



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN INVESTASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI



**AHDA RIDALA
05951039**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

	No.Alumni Universitas	Ahda Ridala	No.Alumni Fakultas
	Biodata		

a).Tempat/Tgl lahir: Sungai Pakning, 7 Oktober 1987 b).Nama Orang Tua: Syahrudin,Refidhani c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No. BPr: 05 951 039 f). Tgl Lulus: 19 Januari 2011 g). IPK: h). Lama Studi: 5 tahun 4 bulan i). Alamat Orang Tua: Jl. Saiyo IV, No.2B Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo – Kota Padang

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah di Indonesia

Skripsi SI oleh: Ahda Ridala

Pembimbing: Sri Maryati, SE.M.Si

Abstrak

Dalam upaya mendorong aktivitas investasi riil yang menciptakan nilai tambah (*value added*) yang dibutuhkan perekonomian, maka perbankan syariah (BUS dan UUS) sebagai bagian dari industri perbankan nasional atau sektor penunjang keuangan sektor riil sangat diharapkan untuk mampu secara serius mensukseskannya. Namun sejak tahun 2006, porsi (*share*) pembiayaan investasi dari total pembiayaan menurun dan hanya berkisar dua puluh hingga dua puluh dua persen.

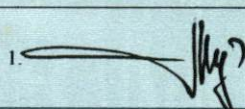
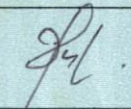
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan investasi perbankan syariah yang meliputi dana pihak ketiga (DPK), tingkat margin pembiayaan investasi, pembiayaan investasi bermasalah dan inflasi selama periode triwulan ke empat 2005 hingga triwulan ketiga 2010. Pengujian dilakukan dengan pembentukan model regresi linear berganda yang merujuk kepada persamaan pembiayaan dalam studi Sayed dan Nezamaddin (1995) mengenai perbankan Islam di Iran yang kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi metode OLS (*Ordinary Least Square*) atau penyimpangan (*error*) yang minimum.

Setelah dilakukan pengujian secara parsial atau individual, ditemukan bahwa hanya variabel dana pihak ketiga dan tingkat margin pembiayaan investasi yang secara signifikan mempengaruhi pembiayaan investasi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, disarankan agar perbankan syariah untuk terus berupaya meningkatkan dana pihak ketiga dan menetapkan tingkat margin pembiayaan investasi sesuai perilaku dunia usaha yang rasional dan bersifat mengambang (*floating*) di tengah dominasi kredit investasi perbankan konvensional, sehingga realisasi pembiayaan investasi yang lebih besar dimasa mendatang dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan nilai tambah dalam perekonomian.

Keyword: Pembiayaan Investasi, dana pihak ketiga (DPK), tingkat margin pembiayaan investasi, pembiayaan investasi bermasalah, dan inflasi

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam seminar hasil dan dinyatakan lulus pada 19 Januari 2011

Abstrak telah disetujui Pembimbing dan Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3.
Nama Terang	Sri Maryati, SE.M.Si	Zulkifli. N, SE, M.Si	Drs. Amra Ausri

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi : **Prof.Dr.H.Firwan Tan.SE,M.Ec.DEA.Ing**
NIP. 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:

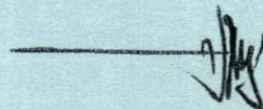
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : **AHDA RIDALA**
No. BP : 05 951 039
Jenjang Pendidikan : S 1 (Strata Satu)
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : **Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi
Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah di
Indonesia**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian seminar hasil yang diadakan pada tanggal 19 Januari 2011 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 7 Februari 2011
Pembimbing



Sri Maryati, SE, M.Si
NIP.132 230 524

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Prof. Dr.H.Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP.19541009 198012 1 001

Prof.Dr.H.Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing
NIP.130 812 952

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, 08 Febuari 2011

AHDA RIDALA
05 951 039

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga terselesaikanlah skripsi yang berjudul, “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah di Indonesia”. Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibuk Sri Maryati, SE. M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak berperan penting di dalam setiap proses penyusunan skripsi.
2. Ibuk Neng Kamarmi SE,M.Si sebagai ketua program studi Ilmu Ekonomi Reguler Mandiri Universitas Andalas.
3. Bapak Fery Andrianus, SE,M.Si sebagai pembimbing akademik.
4. Bapak Prof. Firwan Tan sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Zulkifli N,SE,M.Si sebagai dosen pembahas I dalam seminar hasil skripsi.
6. Bapak Drs. Amra Ausri sebagai dosen pembahas II dalam seminar hasil skripsi.
7. Bapak Yon, sebagai PTU di Biro Ilmu Ekonomi Reguler Mandiri.
8. Bapak Ghafari Ramadhani sebagai Kepala Sub Bagian Bidang Kajian Ekonomi dan Moneter di Bank Indonesia Padang.
9. Bapak Kunto yang merupakan staf PTU bagian perpustakaan Bank Indonesia Padang.
10. Seluruh rekan – rekan Jurusan Ilmu Ekonomi reguler dan reguler mandiri angkatan 2004, 2005, dan 2006.
11. Para dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.

Semoga seluruh pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesaikanlah skripsi ini dikaruniai oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan perbaikan sangat penulis harapkan demi perbaikan dan proses ke arah kesempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, khususnya bagi rekan – rekan Ilmu Ekonomi dan seluruh pihak yang membutuhkannya, yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu dalam memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi islam dan perbankan syariah.

Padang, 8 Febuari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Perumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 7

1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori 10

2.1.1 Teori Investasi Syariah 10

2.1.2 Dana Pihak Ketiga di Perbankan Syariah Sebagai Sumber
Pembiayaan Investasi 11

2.1.2.1 Produk Dana Simpanan (Tabungan) 12

2.1.2.2 Produk Dana Investasi 13

2.1.2.3 Pool Of Fund Approach untuk Alokasi
Pembiayaan Investasi 15

2.1.3 Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah 15

2.1.3.1 Produk Pembiayaan Investasi 17

2.1.3.1.1 Pembiayaan Musyarakah 17

2.1.3.1.2 Pembiayaan Mudharabah 19

2.1.3.1.3 Pembiayaan Murabahah 21

2.1.3.1.3.1 Tingkat Margin 22

2.1.3.2 Pembiayaan Investasi Bermasalah (NPF) 23

2.1.4 Inflasi 26

2.1.4.1 Konsep dan Pengukuran Inflasi 26

2.1.4.2	Penyebab Terjadinya Inflasi	29
2.1.4.3	Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah	32
2.2	Tinjauan Pustaka	34
2.2.1	Inflasi sebagai Determinan Investasi	34
2.2.2	NPF dan Pembiayaan Perbankan	35
2.2.3	Inflasi dan Pembiayaan Perbankan	36
2.2.4	Tingkat Margin dan Pembiayaan Perbankan Syariah	38
2.3	Hipotesis	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Rancangan Variabel	40
3.2	Jenis dan Sumber Data	42
3.3	Model Analisis Penelitian	43

BAB IV GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

4.1	Perkembangan Pembiayaan	47
4.2	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)	52
4.3	Perkembangan Pembiayaan Investasi	56
4.4	Perkembangan Inflasi	65

BAB V PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1	Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis	67
5.1.1	Hasil Regresi	70
5.1.1.1	Uji Asumsi Klasik	71
5.1.1.1.1	Uji Autokorelasi	71
5.1.1.1.2	Heterokedastisitas	72
5.1.1.1.3	Multikolinearitas	73
5.1.1.1.4	Uji Normalitas	75
5.1.1.2	Pengujian Hipotesis dan Intepretasi Model	76
5.2	Implikasi Penemuan Empiris	82
5.3	Keterbatasan Penelitian	82

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 : Nilai dan Share Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	1
Tabel 1.2 : Tingkat Margin Rata - Rata Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah	3
Tabel 1.3 : Inflasi atas dasar IHK dan Rasio Pembiayaan Investasi Bermasalah (NPF)	4
Tabel 2.1 : Pemenuhan Modal Investasi Melalui Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah	22
Tabel 4.1 : LDR Perbankan Konvensional	47
Tabel 4.2 : FDR Perbankan Syariah	48
Tabel 4.3 : Kondisi Umum FDR Perbankan Syariah di Berbagai Negara	48
Tabel 4.4 : Share Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, dan Konsumsi	50
Tabel 4.5 : Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah dan Kredit Investasi Perbankan Konvensional	50
Tabel 4.6 : Nasabah Pasar Pembiayaan dan Penghimpunan Dana Perbankan Syariah di Indonesia	51
Tabel 4.7 : Perkembangan Triwulanan Dana Pihak Ketiga (DPK)	52
Tabel 4.8 : Pertumbuhan Triwulanan Dana Pihak Ketiga (DPK)	53
Tabel 4.9 : Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)	54
Tabel 4.10 : Perkembangan Deposito Mudharabah Beserta Tingkat Bagi Hasilnya	55
Tabel 4.11 : Tingkat Bagi Hasil Rata – Rata DPK atas Tabungan Mudharabah dan Giro Wadiah	57
Tabel 4.12 : Peringkat Indonesia berdasarkan Iklim Melakukan Investasi	57
Tabel 4.13 : Jaringan Kantor Perbankan Syariah	58
Tabel 4.14 : Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah	60
Tabel 4.15 : Pembiayaan Investasi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Propinsi	61
Tabel 4.16 : Perkembangan Pembiayaan Investasi	63
Tabel 4.17 : Tingkat Margin Pembiayaan Investasi dan Rasio Pembiayaan Investasi bermasalah	64
Tabel 4.18 : Inflasi Atas Dasar Indeks Harga Konsumen (2002 = 100)	66
Tabel 5.1 : Hasil Estimasi Regresi	70
Tabel 5.2 : Pendektesian Autokorelasi	73
Tabel 5.3 : Pendektesian Masalah Multikolinearitas	75
Tabel 5.4 : Uji t (Secara Parsial atau Individual)	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketidakmampuan sektor perbankan di Indonesia sebagai sektor penunjang keuangan sektor riil yang ideal adalah kondisi yang selalu saja berlarut di dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kinerja intermediasi perbankan konvensional melalui angka LDR (*loan deposit ratio*) yang hanya di bawah 80 persen sejak krisis tahun 1997 berlalu¹. Sedangkan perbankan syariah yang memiliki kinerja intermediasi melalui angka FDR (*financing deposit ratio*) di atas 80 persen hanyalah lembaga keuangan yang tidak mendominasi pasar pembiayaan. Bahkan sejak tahun 2006, share pembiayaan investasi perbankan syariah hanya sebesar 20 hingga 21 persen dibandingkan dengan pembiayaan modal kerja dan konsumsi.

Tabel 1.1
Nilai dan Share Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan
Triwulan III 2005 – Triwulan III 2010

Jenis Pembiayaan	Triwulan III 2005	Triwulan IV 2005	Triwulan IV 2006	Triwulan IV 2007	Triwulan IV 2008	Triwulan IV 2009	Triwulan II 2010	Triwulan III 2010
Investasi (Milliar Rupiah)	4.210	4.287,19	4.373,73	5.640	7.907	9.955	11.233	12.120
Share Investasi (%)	27,61	28,08	21,4	20,2	20,7	21,2	20,1	19,9
Modal Kerja (Milliar Rupiah)	7.730	7.988	10.405	15.656	20.554	22.873	27.848	29.688
Share Modal Kerja (%)	53,77	52,31	50,9	56,0	53,8	48,8	49,9	48,7
Konsumsi (Milliar Rupiah)	3.110	2.956	5.666	6.652	9.734	14.058	16.721	19.162
Share Konsumsi (%)	18,62	19,61	27,7	23,8	25,5	30,0	30,0	31,4

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Bulanan Perbankan Syariah Tahun 2005 – Juni 2010

¹ Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2005 – September 2010 dan Laporan Perekonomian Tahun 2007.

Share pembiayaan investasi perbankan syariah yang mengalami penurunan sejak tahun 2006 tentu tidak diharapkan terjadi di tengah prinsip perbankan syariah yang telah dituntun syariat Islam untuk selalu mengedepankan pembiayaan produktif terutama untuk tujuan investasi yang pada akhirnya menciptakan *value added* (nilai tambah) yang dibutuhkan perekonomian. Dengan demikian, peranan perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam berinvestasi adalah permasalahan yang serius di tengah kondisi umum kredit investasi perbankan konvensional dengan suku bunganya yang cukup memprihatinkan sebagai penghambat investasi dunia usaha di dalam perekonomian nasional.

Mannan (1993) telah mengemukakan bahwa peranan perbankan syariah dalam tataran makro ekonomi tidak hanya sebatas antar sektor saja, namun perbankan ini juga telah mensukseskan perencanaan negara dalam pemanfaatan sumber daya yang optimal akibat tidak berlakunya tingkat bunga². Dengan demikian, turunnya share pembiayaan investasi perbankan syariah sesungguhnya tidaklah diharapkan terjadi hingga saat ini.

Pembiayaan investasi yang disalurkan perbankan syariah pada prinsipnya merupakan kegiatan pemenuhan investasi riil dunia usaha melalui akad mudharabah dan musharakah. Motif utama perbankan syariah tersebut atas pembiayaan investasinya adalah *expected of profit* yang tidak pasti di masa depan seperti yang dikemukakan Metwaly (1995). Hal inilah yang kemudian memperlihatkan bahwa pembiayaan investasi perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional dengan tingkat bunganya dan menghindari resiko ketidakpastian.

Meskipun demikian, karena tujuan dilaksanakannya investasi riil adalah untuk pengadaan barang – barang modal baru dan yang telah terdepresiasi untuk proses produksi, maka pembiayaan berakad jual beli yaitu murabahah dengan tingkat

² Mannan (1993). Hal. 175

marginnya juga dapat dijadikan solusi alternatif yang diberikan perbankan syariah kepada dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan investasinya.

Pembiayaan investasi yang berakad murabahah untuk memenuhi investasi dunia usaha adalah model pembiayaan jual beli dengan basis tingkat margin sebagai ekspektasi keuntungan bank syariah. Hal inilah yang selanjutnya secara prinsip memberikan keuntungan bagi perbankan syariah dalam pembiayaan investasinya dengan menghindari resiko ketidakpastian seperti akad berbagi hasil dan resiko. Kemudian, melalui pembiayaan investasi berdasarkan tingkat margin inilah dunia usaha juga dapat dengan mudah melaksanakan investasinya dan keringanan dalam pembayarannya selain tunai, yaitu dalam bentuk tangguh ataupun cicilan yang tingkat marginnya fixed (tetap).

Jadi, dengan melihat produk pembiayaan investasi yang disalurkan perbankan syariah dapat dipenuhi seperti melalui pembiayaan berbasis tingkat margin, maka share pembiayaan investasi yang telah mengalami penurunan sejak tahun 2006 tersebut dimungkinkan terjadi akibat tingkat margin yang ditetapkan perbankan syariah atau di bank umum dan unit usaha syariah secara rata - rata terus mengalami kenaikan hingga mencapai 13,82 persen di triwulan kedua tahun 2010.

Tabel 1.2
Tingkat Margin Rata - Rata Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah
Triwulan IV 2005 – Triwulan III 2010

	Triwulan IV 2005	Triwulan IV 2006	Triwulan IV 2007	Triwulan IV 2008	Triwulan IV 2009	Triwulan II 2010	Triwulan III 2010
Tingkat Margin Pembiayaan Investasi (%)	12,51	13,34	13,87	13,67	13,75	13,82	13,45

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2008 – September 2010

*tingkat margin triwulanan berdasarkan tingkat margin pada bulan akhir di setiap periode triwulannya

Pengaruh negatif tingkat margin sebagai ekspektasi keuntungan perbankan syariah atas pembiayaan investasinya melalui akad murabahah (jual beli) diduga akibat

posisi tingkat margin tersebut bagi dunia usaha adalah biaya tambahan seperti suku bunga kredit setelah angsuran pembayaran harga perolehan atas pembelian barang modal.

Jadi dengan kondisi seperti yang dikemukakan oleh Mohammed (2006) bahwa nasabah (dunia usaha) mengedepankan rasionalitasnya dalam memilih produk pembiayaan perbankan syariah berbasis PLS (*profit and loss sharing*) atau berbagi hasil dan resiko yang menjadi biaya dalam menghasilkan keuntungan, maka dapat dimungkinkan bahwa produk pembiayaan investasi melalui akad murabahah yang tingkat marginnya terus mengalami kenaikan telah menjadi penyebab lesunya pembiayaan investasi perbankan syariah. Hal tersebut juga diduga terjadi akibat adanya dunia usaha yang bersifat mengambang (*floating*) yang mengharapkan tingkat pengembalian (*return*) yang tertinggi dan biaya yang terendah atas produk pembiayaan perbankan syariah³.

Kemudian, turunnya share pembiayaan investasi ditengah nilai pembiayaannya yang terus mengalami kenaikan juga diduga terjadi bukan hanya akibat naiknya tingkat margin namun juga pengaruh inflasi dan naiknya rasio NPF untuk pembiayaan investasi yang mencapai lima persen lebih jika dibandingkan pada tahun 2005 sebesar 3,45 persen.

Tabel 1.3
Inflasi atas dasar IHK dan Rasio Pembiayaan Investasi Bermasalah
Triwulan IV Tahun 2005 – Triwulan III 2010

	Trwln IV 2005	Trwln IV 2006	Trwln IV 2007	Trwln IV 2008	Trwln IV 2009	Trwln III 2010
Inflasi (%)	10,08	2,44	2,09	0,53	0,49	3,16
Rasio Pembiayaan Investasi Bermasalah (%)	3,45	5,90	5,78	6,18	5,36	6,44

Sumber :Inflasi diolah, berdasarkan laporan inflasi bulanan Badan Pusat Statistik Nasional
Rasio pembiayaan investasi bermasalah diolah, berdasarkan Statistik Bulanan Perbankan Syariah, Juni 2010

³ Nuenung (2006).JIMBE. Hal. 868

Inflasi yang diduga telah mempengaruhi pembiayaan investasi sesuai dengan konsep umum pengaruh negatif inflasi dan juga yang dikemukakan Hamid (1995), bahwa inflasi memperkecil pembagian keuntungan dari perusahaan yang mengelola modal (investasi) dan pemilik modal seperti perbankan syariah. Jadi, apabila konsep inflasi tersebut dikaitkan dengan motif perbankan syariah dalam pembiayaan investasinya seperti yang dikemukakan Fahim Khan (2004) dalam Nurul Huda et.al (2008) bahwa berkaitan erat dengan besarnya harapan tingkat keuntungan yang diharapkan dalam skema berbagi hasil dan resiko sesuai dari total profit yang diharapkan dari pengelola investasi maka inflasi tersebut dapat diduga telah mempengaruhi ke arah negatif besaran pembiayaan investasi yang selama ini telah disalurkan.

Pengaruh negatif inflasi atas pembiayaan investasi juga diduga seperti hasil kajian Priyo dan Tarsidin (2007) yang mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan resiko usaha hampir di seluruh sektor ekonomi di Indonesia dengan besaran yang relatif tinggi. Hal tersebut digambarkan kepada perusahaan yang mempunyai permintaan produk bersifat elastis. Sehingga, kondisi inflasi tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan kegiatan investasi dunia usaha di berbagai sektor akan mengalami kelesuan.

Selanjutnya, dugaan adanya pengaruh NPF atau pembiayaan investasi bermasalah atas pembiayaan investasi di perbankan syariah adalah dilihat berdasarkan teori. NPF investasi merupakan kegagalan bank syariah untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi dan mempengaruhi profitabilitas ke arah negatif. Sehingga, dengan penyebab terjadinya NPF tersebut seperti akibat faktor internal bank yaitu kurangnya prinsip kehati – hatiannya (*prudential principle*) maka kondisi yang lazim terjadi layaknya di perbankan konvensional adalah terjadi pengetatan persyaratan dan

kebijakan pembiayaan untuk menghindari kerugian (profitabilitas) lebih besar yang pada akhirnya akan berdampak kepada berkurangnya jumlah pembiayaan yang akan direalisasikan dari permintaan yang ada⁴.

Bahkan, pengaruh negatif pembiayaan investasi bermasalah atas realisasi pembiayaan investasi juga dapat dilihat dari kondisi kredit bermasalah (NPLs) yang dikemukakan Bank Indonesia (2003) sebagai salah satu parameter pengukuran resiko kredit secara internal yang harus ada dalam manajemen resiko untuk menghindari kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya⁵. Kemudian, dugaan tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan Meydianawathi (2007) bahwa NPL (*non performing loan*) telah menyebabkan turunnya penawaran kredit investasi perbankan konvensional di Indonesia.

Meskipun demikian, hal yang terpenting dan menjadi dugaan penyebab turunnya share pembiayaan investasi di perbankan syariah adalah DPK (dana pihak ketiga) yang dikenal sebagai sumber pembiayaan investasi dari aliran intermediasi. Keadaan tersebut juga sesuai dengan wacana umum yang mendeskripsikan bahwa fluktuasi konjungtur ekonomi baik menuju kesejahteraan atau depresi, maka bank syariah seolah-olah seperti kapal di laut mengikuti ombak tetapi tidak akan tenggelam⁶.

Kondisi pembiayaan investasi yang telah terjadi di dalam perekonomian Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2010 tentunya tidak diharapkan terus terjadi dengan pergerakan sharenya yang lambat. Hal ini juga berarti bahwa kontribusi pembiayaan investasi yang diharapkan ideal dalam menyediakan kebutuhan investasi dunia usaha di sektor riil sulit direalisasikan dan bahkan dapat memperburuk situasi perekonomian. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa situasi pembiayaan investasi

⁴ Juli, et.al (2002).Hal 85 - 86

⁵ Bank Indonesia (2003). Pedoman Standar Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum. Hal.23

⁶ Republika Newsroom (2009). "Arie Mooduto - Nasabah Bank Syariah Tak Steril dari Krisis".

perbankan syariah yang telah terjadi sejak tahun 2006 tersebut sangat penting untuk dianalisa dengan berbagai faktor – faktor yang diduga telah mempengaruhinya melalui skripsi ini yang berjudul, “**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah di Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah.
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat margin pembiayaan investasi terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah.
3. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan investasi bermasalah terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah.
4. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaruh DPK terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah
2. Untuk menganalisa pengaruh tingkat margin pembiayaan investasi terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah.
3. Untuk menganalisa pengaruh pembiayaan investasi bermasalah terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah.
4. Untuk menganalisa pengaruh inflasi terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan akan difokuskan kepada pembiayaan investasi perbankan syariah di Indonesia yang meliputi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Adapun keterangan lebih lanjut mengenai beberapa hal yang diatur dan menjadi batasan studi adalah sebagai berikut :

1. Periode analisis studi yang digunakan adalah triwulan empat tahun 2005 hingga triwulan ketiga tahun 2010.
2. Pembiayaan investasi perbankan syariah di dalam studi adalah pembiayaan investasi secara agregat (keseluruhan) dari akad mudharabah, musharakah, dan murabahah.
3. Dana pihak ketiga adalah jumlah dana yang terhimpun dari produk titipan, simpanan, dan deposito investasi mudharabah perbankan syariah.
4. Tingkat margin pembiayaan investasi adalah tingkat margin rata – rata pembiayaan investasi perbankan syariah.
5. Pembiayaan investasi bermasalah merupakan pembiayaan investasi bermasalah kotor (gross) tanpa memperhitungkan penyisihan yang dibentuk untuk mengantisipasi resiko kerugian.
6. Tingkat Inflasi berdasarkan indeks harga konsumen (IHK).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ilmiah yang baik dapat ditempuh dengan sistematika penulisan yang benar. Oleh karena itu, penulisan di setiap bab dan sub bab akan selalu disesuaikan ketentuan tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud, dapat dilihat dalam deskripsi paragraph berikut ini.

BAB I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan kerangka teori yang menguraikan teori investasi syariah, sumber dana pembiayaan investasi, pembiayaan investasi, produk pembiayaan investasi perbankan syariah, pembiayaan investasi bermasalah, dan inflasi. Kemudian, bab ini ditutup dengan hipotesis yang didahului dengan beberapa tinjauan pustaka mengenai inflasi sebagai determinan investasi, pembiayaan bermasalah perbankan, inflasi, dan tingkat margin pembiayaan.

BAB III, merupakan metodologi penelitian yang menguraikan rancangan variabel penelitian, jenis dan sumber data, dan model analisis penelitian.

BAB IV, merupakan tinjauan umum yang menguraikan tentang gambaran umum perbankan syariah di Indonesia yang meliputi perkembangan pembiayaan, dana pihak ketiga, pembiayaan investasi, tingkat margin pembiayaan investasi, pembiayaan investasi bermasalah, dan inflasi dalam kurun waktu triwulan ke empat tahun 2005 hingga triwulan ketiga tahun 2010.

BAB V, merupakan hasil penemuan empiris dan implikasi kebijaksanaan.

BAB VI, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Investasi Syariah

Penanaman modal atau lazimnya disebut investasi di dalam teori ekonomi tergolong sebagai investasi riil dan bukanlah investasi finansial. Investasi riil adalah pengeluaran - pengeluaran untuk membeli barang - barang modal dan peralatan - peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang - barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan atau dapat diartikan sebagai perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian⁷. Kegiatan investasi riil inilah yang juga menjadi fokus utama di dalam teori ekonomi Islam dan disebut sebagai investasi syariah.

Investasi syariah yang berlaku layaknya investasi riil memiliki perbedaan mendasar dengan bentuk investasi konvensional, di antaranya adalah tidak berlakunya tingkat suku bunga dan tujuannya tidaklah menimbulkan kerugian para pelaku ekonomi serta tidak melanggar aturan Islam dalam berinvestasi. Kemudian, jika dunia usaha memerlukan pembiayaan investasi maka dilakukan kesepakatan bagi hasil dengan investor atau pemilik dana investasi (lembaga keuangan syariah) atas keuntungan dari pengelolaan investasi tersebut.

Konsep yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan investasi Islam oleh lembaga keuangan seperti perbankan syariah adalah berfokus kepada biaya dunia usaha untuk melakukan investasi melalui kesepakatan nisbah bagi hasil atas expected of profit (keuntungan yang diharapkan).

⁷ Sadono (2000). Makro Ekonomi Moderen. Hal 366

Menurut Metwaly (1995), fungsi investasi dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut⁸ :

$$I = f (r, \mu), \text{ dengan } r = SI/SF \dots\dots\dots (2.1)$$

dimana : I = permintaan akan investasi

r = tingkat keuntungan yang diharapkan

μ = pengeluaran lain – lain zakat atas aset yang tidak atau kurang produktif

SI = bagian / pangsa keuntungan / kerugian investor

SF = bagian / pangsa keuntungan / kerugian peminjam dana

Persamaan 2.1 di atas menjelaskan bahwa investasi di dalam ekonomi islam akan mengalami peningkatan jika keuntungan yang diharapkan meningkat dan juga apabila terjadi peningkatan iuran terhadap aset yang tidak atau kurang produktif (sanksi atas aset kurang atau tidak produktif). Hal ini dapat dipahami bahwa di dalam ekonomi Islam, lembaga keuangan seperti perbankan syariah yang menghimpun dana masyarakat dan mengintermediasi dana tersebut ke dalam sektor riil yang membutuhkan investasi adalah pihak yang menentukan besaran investasi daripada investor yang rasional. Sehingga, investasi akan meningkat di saat share keuntungan bank syariah (SI) semakin besar dibandingkan share peminjam dana (SF).

2.1.2 Dana Pihak Ketiga di Perbankan Syariah Sebagai Sumber Pembiayaan Investasi

Dana pihak ketiga (DPK) yang dikenal di dalam industri perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito investasi mudharabah. Kesemua produk DPK tersebut pada dasarnya dapat digunakan sebagai sumber

⁸Nurul Huda,et.al (2008).Hal 50

pembiayaan investasi, sesuai sifat produknya dan juga karena berlakunya *pool of fund approach* untuk pembiayaan investasi.

2.1.2.1 Produk Dana Simpanan (Tabungan)

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori tabungan di dalam makro ekonomi Islam dan teori keseimbangan perekonomian dua sektor. Agregat suply (pendapatan nasional) di dalam perekonomian dua sektor adalah pengeluaran agregat ditambah tabungan. Jadi pengeluaran agregat tersebut jika dikondisikan di dalam perekonomian Islam maka bentuknya adalah konsumsi untuk pembayar zakat dan konsumsi penerima zakat ditambah dengan tabungan. Kondisi ini dapat terjadi karena di dalam perekonomian dua sektor tidak semua pendapatan nasional habis untuk konsumsi namun juga untuk tabungan.

Teori Konsumsi Metwaly (1995)⁹

$$C = a + b (\beta Y - \alpha Y) + \delta [(1-\beta) Y + \alpha Y] \dots\dots\dots (2.2)$$

$a + b (\beta Y - \alpha Y)$ = fungsi konsumsi untuk pembayar zakat

$\delta [(1-\beta) Y + \alpha Y]$ = fungsi konsumsi untuk penerima zakat

dimana , bY = pendapatan pembayar zakat

$(1 - \beta) Y$ = pendapatan penerima zakat

δ = hasrat konsumsi marginal penerima zakat

Kemudian, menurut Nurul Huda, et al (2008) apabila teori konsumsi Metwaly tersebut dikaitkan dengan konsep tabungan di dalam perekonomian dua sektor yaitu :

$S = Y - C$, maka diperoleh fungsi tabungan dalam ekonomi makro Islam¹⁰ :

$$S = Y - a - b (\beta Y - \alpha Y) - \delta [(1-\beta) Y + \alpha Y] \dots\dots\dots (2.3)$$

⁹ *Op Cit.* Hal 43
¹⁰ *Ibid.* Hal. 44

Jadi, apabila fungsi tabungan di atas dikaitkan dengan keseimbangan perekonomian dua sektor yaitu AD (fungsi dari $C + I$) = AS (fungsi dari $C + S$), yang berarti bahwa investasi dalam perekonomian hanya dapat terpenuhi melalui tabungan yang ada di perbankan atau $S = I$. Maka tabungan (produk dana simpanan) yang ada di perbankan syariah sebagai sumber pembiayaan investasi di dalam perekonomian dua sektor juga berlaku demikian. Sehingga dengan keadaan perekonomian empat sektorpun, maka tabungan yang berakad mudharabah tetaplah sebagai sumber pembiayaan investasi untuk sektor riil.

2.1.2.2 Produk Dana Investasi

Produk dana investasi di perbankan syariah dikenal sebagai deposito investasi mudharabah. Keterkaitan produk investasi masyarakat ini sangatlah erat atas pembiayaan investasi. Keadaan ini dapat dijelaskan melalui teori permintaan uang masyarakat islami pandangan Khan (1995) dalam Nurul Huda et.al (2008) dan keterkaitannya dengan investasi riil melalui fungsi deposito investasi itu sendiri.

Motif memegang uang atau permintaan uang di dalam ekonomi Islam menurut Pandangan Khan (1995) dalam Nurul Huda et.al (2008) adalah :

$$LA = Ky - hQ \dots\dots\dots (2.4)^{11}$$

$$LA = KY - haR \text{ atau } LA = kY - h'a, \text{ dimana } h' = hR$$

LA = Permintaan akan uang

Q = ekspektasi profit pada financial aset untuk pemilik aset

KY = transaksi dan kegiatan altruistic (motif kebaikan) atau ZISWA (zakat, infak, sedekah, dan wakaf)

¹¹ *Op Cit.* Hal. 149

Dari persamaan permintaan uang terlihat bahwa munculnya komponen (a) atau rasio profit sharing (return investasi) dari aset financial (aset keuangan) adalah faktor negatif untuk mempengaruhi permintaan uang real.

Finacial aset (aset keuangan) di dalam ekonomi merupakan aset keuangan yang dapat berpindah tangan dan menghasilkan return. Jika konteksnya untuk investasi maka aset keuangan tersebut tergolong sebagai bentuk investasi sekunder.

Jadi, bagi masyarakat islam adanya deposito investasi di perbankan syariah merupakan bentuk financial aset yang ditandai dengan terjadinya perpindahan dana (uang) masyarakat ke bank syariah untuk dimanfaatkan secara ekonomi (menghasilkan return) yaitu pembiayaan investasi ke sektor riil. Dengan demikian, semakin besar jumlah deposito investasi mudharabah di perbankan syariah maka pembiayaan investasi ke dunia usaha juga akan semakin besar.

Kemudian, dibalik fungsi deposito investasi mudharabah yang vital dalam perekonomian, permasalahan umum yang terjadi di perbankan syariah malah sebaliknya. Ada kecenderungan produk ini kurang diminati oleh perbankan syariah mengingat biaya atas dana ini lebih besar (mahal) dari produk dana simpanan dan titipan.

Adapun karateristik dari produk deposito investasi mudharabah adalah¹² :

1. Motif utama nasabah adalah investasi
2. Pengembalian dana investasi dilakukan sesuai kesepakatan investasi seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan , dan 12 bulan.

Karakter yang dimiliki dari produk dana investasi ini lebih lanjut berprinsip mudharabah. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah sistem bagi hasil dari bank untuk investor. Bank sebagai mudharib, sedangkan investor (masyarakat) sebagai

¹² Sunarto (2003). Hal 105

shahibul maal. Namun di dalam kegiatan pembiayaan investasi maka perbankan syariah akan menjadi shahibul mal (investor) sedangkan dunia usaha adalah pengelola investasi.

2.1.2.3 Pool Of Fund Approach untuk Alokasi Pembiayaan Investasi

Metode ini adalah pengalokasian dana dari gabungan dana yang masuk dari unit surplus ke dalam bentuk produk dana simpanan, giro, dan investasi. Alokasi yang dilakukan melalui metode ini bentuknya tanpa memperhatikan jenis, sifat, sumber dana, jangka waktu serta biaya dana¹³. Sehingga, berbagai dana unit surplus (DPK) yang masuk melalui berbagai produk pendanaan akan dialokasikan seperti ke dalam bentuk pembiayaan investasi.

Kondisi ini dapat berlaku di perbankan syariah, meskipun dikenal metode alokasi aset yang memperlakukan sumber dana sesuai karakteristiknya untuk disalurkan. Jadi dengan adanya pool of fund approach untuk alokasi pembiayaan maka keseluruhan produk yang membentuk dana pihak ketiga dapat digunakan sebagai sumber dana pembiayaan investasi, yang meliputi giro wadiah (titipan), tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito investasi mudharabah.

2.1.3 Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan bisnis yang berprinsip syariah tetaplah memiliki dasar penyaluran pembiayaan investasi dengan motif keuntungan yang tinggi. Namun, dengan menyadari bahwa pembiayaan investasi terkait erat dengan permintaan investasi dari dunia usaha yang juga memperhatikan tingkat keuntungannya atas pembiayaan yang diperoleh sesuai teori Metwaly (1995), maka penawaran pembiayaan investasi perbankan syariah tidak terlepas dari tingkat keuntungan yang diharapkan oleh dunia usaha.

¹³ Juli,et.al (2002). *Op Cit.* Hal.69

Pembiayaan investasi yang disalurkan perbankan syariah pada prinsipnya merupakan kegiatan pemenuhan investasi riil dunia usaha melalui akad mudharabah dan musharakah. Kedua bentuk pembiayaan tersebutlah yang menjadi identitas umum dari pembiayaan investasi perbankan syariah. Kemudian, dengan tetap memperhatikan tujuan investasi riil, maka perbankan syariah juga memiliki produk pembiayaan investasi dengan akad murabahah (jual beli).

Pembiayaan murabahah sesuai yang dikemukakan Bank Indonesia adalah pembiayaan dengan akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barangnya dijelaskan dengan rinci dan diserahkan setelah akad jual beli serta pembayarannya bisa dilakukan secara mengangsur (cicilan) ataupun sekaligus. Jadi, pembiayaan yang identik dengan keuntungan perbankan syariah dengan kesepakatan nasabah atau disebut juga dengan tingkat margin dapat digunakan untuk membiayai pembelian barang modal produksi.

Namun, dengan posisi tingkat margin sebagai keuntungan yang diharapkan (*expected of profit*) bank syariah atas pembiayaan murabahahnya (jual beli) dan biaya bagi nasabah (dunia usaha), sehingga apabila terjadi kenaikan pada ratenya maka permintaan pembiayaan investasi dapat terpengaruh turun. Kondisi ini dapat dilihat seperti pembiayaan investasi yang dilakukan melalui akad musyarakah dan mudharabah melalui nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh perbankan syariah terkait erat dengan rasionalitas dunia usaha yang menilai bahwa nisbah bagi hasil untuk bank syariah tetap berada dibawah *interest on debts* atau tingkat bunga pinjaman perbankan konvensional (*iD*) dan dapat menghasilkan profit lebih besar daripada melalui kredit perbankan konvensional. Lebih lanjut hal ini dapat dijelaskan melalui konsep mikro pemilihan

pembiayaan berbasis PLS oleh perusahaan seperti yang diuraikan oleh Mohammed (2006) di dalam uraian berikut ini¹⁴.

Pembayaran ke bank syariah oleh perusahaan melalui konsep PLS (*profit and loss sharing*) atau berbagi hasil dan resiko : $(ppr) \times (p)$

Keterangan :

ppr (*predetermined profit ratio*) atau rasio laba yang ditentukan

P adalah *profit margin*

Jadi, keuntungan sebelum pajak bagi perusahaan adalah :

$$P (\text{profit dunia usaha}) - ((ppr) \times (p))$$

Sehingga, perusahaan akan memilih model pembiayaan PLS dalam kondisi :

$$P - (p \times ppr) \geq pi (\text{profit melalui kredit perbankan konvensional})$$

Keterangan : Profit melalui kredit perbankan konvensional (*pi*) diperoleh

melalui :

$$pi = sales (\text{nilai penjualan}) - overheads (\text{biaya tidak langsung}) - interest on debts (iD) \text{ atau tingkat suku bunga pinjaman}$$

2.1.3.1 Produk Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi yang secara umum disalurkan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan melalui akad mudharabah dan musyarakah. Penjelasan mengenai produk pembiayaan investasi tersebut adalah sesuai buku kodifikasi perbankan syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh direktorat perbankan syariah Bank Indonesia tahun 2007.

2.1.3.1.1 Pembiayaan Musyarakah

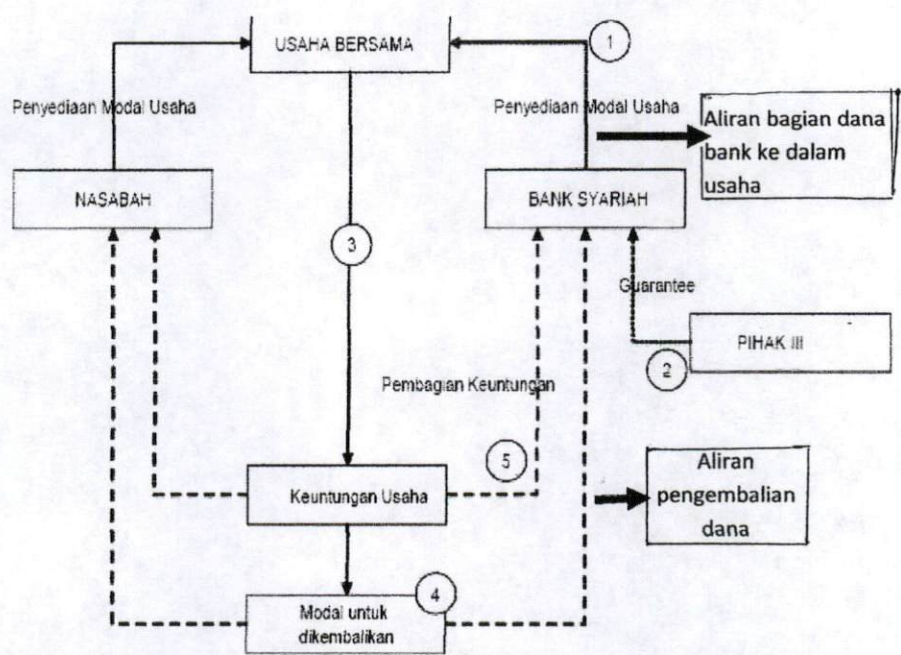
Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

¹⁴ Mohammed (2006). Hal 33 - 34

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Kemudian, pembiayaan ini disebut juga dengan *equity participation* yang berarti perbankan syariah juga berlaku dan berprinsip layaknya investor yang menempatkan dananya pada sebuah proyek investasi dengan bermitra dengan dunia usaha serta memiliki wewenang dalam kegiatan investasi yang dilaksanakan demi menjaga rate of return (tingkat pengembalian) atas investasi dapat dicapai.

Bagan 2.1

Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan Kongsi Usaha)



Proses Transaksi:

1. Bank dan Nasabah menyediakan modal usaha yg disepakati
2. Bank dapat meintakan garansi untuk antisipasi wan prestasi
3. Laba usaha (bila ada) terakumulasi, bila ada kesepakatan distribusi laba periodik, dapat dilakukan.

Proses Transaksi (lanjutan):

4. Recovery capital harus dilakukan terlebih dahulu.
5. Distribusi profit atas dasar rasio yg disepakati

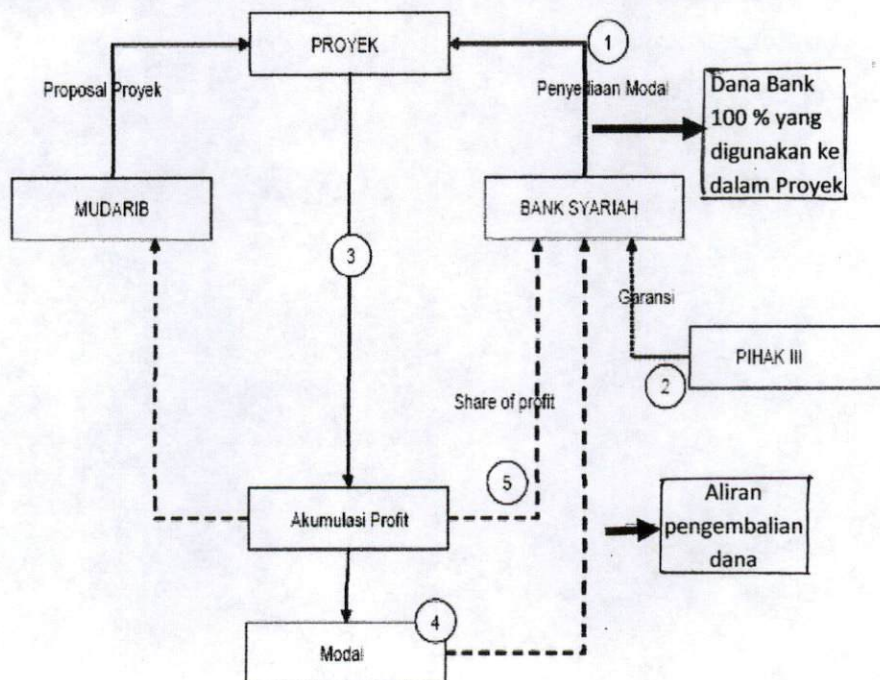
Manfaat utama pembiayaan musyarakah bagi nasabah adalah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek. Sedangkan bank syariah akan memperoleh kesempatan mendapatkan profit yaitu bagi

hasil dari pembiayaan ketika terjadinya peningkatan pendapatan usaha dan bank tidak akan terbatas dengan pendapatan yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Disamping itu, bank akan mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris). Namun, risiko utama yang harus dihadapi perbankan syariah dari produk ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi (menghindari kewajibannya) atau *default* (gagal bayar). Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan musyarakah diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Selain itu, terdapat risiko operasional berupa *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi / pencatatan maupun pelaporan.

2.1.3.1.2 Pembiayaan Mudharabah

Bagan 2.2

Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) / Share - Based Financing



Proses Transaksi:

1. Bank menyediakan modal usaha, nasabah menyediakan softskill
2. Bank dapat memintakan garansi untuk antisipasi wan prestasi
3. Laba usaha (bila ada) terakumulasi, bila ada kesepakatan distribusi laba periodik, dapat dilakukan.

Proses Transaksi (lanjutan):

4. Recovery capital harus dilakukan terlebih dahulu.
5. Distribusi profit atas dasar rasio yg disepakati

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal. Spesifiknya pembiayaan ini dapat dipisahkan menjadi mudharabah muqayyadah dan muthlaqah. Mudharabah muthlaqah adalah *unrestricted fund* (pembiayaan tidak terikat) atau shahibul maal memberikan hak yang tidak terbatas kepada mudharib untuk melakukan investasi, sedangkan mudharabah muqayyadah adalah *restricted fund* (pembiayaan terikat) atau mudharib dibatasi haknya oleh shahibul maal, antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Kemudian, untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis maka pembiayaan sesuai permintaan pemilik dana¹⁵.

Manfaat utama pembiayaan mudharabah bagi nasabah adalah untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha nasabah. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan mudharabah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek. Sedangkan, perbankan syariah akan memperoleh keuntungan bagi hasil dengan menghadapi risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi (menghindari kewajibannya) atau *default* (gagal bayar).

Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan mudharabah diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Selain itu, terdapat risiko operasional berupa *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi atau pencatatan maupun pelaporan.

¹⁵ Sunarto (2003). *Op Cit.* Hal 55

2.1.3.1.3 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang / kewajibannya sesuai dengan akad.

Adapun ketentuan tambahan mengenai pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

1. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan.
2. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.
3. Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (pada akhir periode atau secara angsuran) sesuai kesepakatan.
4. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan margin dan ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
5. Apabila bank memperoleh potongan harga (diskon) dari *supplier* sebelum terjadinya transaksi murabahah maka besarnya potongan harga (diskon) merupakan hak nasabah dan sebagai pengurang harga jual murabahah.

6. Apabila bank memperoleh potongan harga (diskon) dari *supplier* setelah terjadinya transaksi murabahah maka pembagian potongan harga (diskon) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dan dituangkan dalam akad serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pembiayaan murabahah inilah yang menjadi alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada dunia usaha dalam membiayai kebutuhan investasinya seperti pembelian barang - barang produktif atau barang modal seperti mesin produksi. Kemudian, dunia usaha juga mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Secara spesifik, pembiayaan investasi yang dipenuhi melalui akad murabahah dapat dilihat pada tabel di bawah ini sesuai yang dikemukakan oleh Bank Indonesia (2007).

Tabel 2.1
Pemenuhan Modal Investasi Melalui Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah

No	Atribut	Keterangan
1.	rate	umumnya lebih tinggi dari suku bunga bank Konvensional
2.	kemampuan memberikan pinjaman	kemampuan modal masih terbatas (terutama untuk korporasi besar)
3.	jangka waktu pengembalian	maksimum 5 Tahun
4.	cara pembayaran	terjadwal
5.	agunan mudah	tergantung pembiayaan dan kredibilitas nasabah serta industrinya
6.	proses yang mudah dan cepat	tergantung dari kelengkapan persyaratan

Sumber : Bank Indonesia (2007).LPI.Hal.39

2.1.3.1.3.1 Tingkat Margin

Bank Indonesia mendefinisikan tingkat margin sebagai besarnya keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual

beli (murabahah). Margin pembiayaan ini bersifat tetap (fixed) tidak berubah sepanjang jangka waktu pembiayaan dan menjadi keuntungan bagi bank syariah.

Tingkat Margin inilah yang menjadi dasar keuntungan perbankan syariah atas pembiayaan berakad jual beli (murabahah) untuk memenuhi kebutuhan barang – barang modal produksi yang diperlukan dunia usaha. Namun, satu hal yang terpenting dari penetapan tingkat margin tersebut adalah pertimbangan atas suku bunga rata – rata perbankan konvensional yang terkatagori sebagai ICMR (Indirect Competitor's Market Rate)¹⁶.

ICMR adalah tingkat suku bunga rata – rata perbankan konvensional atau tingkat suku bunga rata – rata beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO (*assets and loans committee*) ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung. Selain itu, pertimbangan lainnya dalam penetapan tingkat margin adalah tingkat margin keuntungan perbankan syariah secara umum, target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada deposan, *acquiring cost* (biaya langsung untuk memperoleh DPK), dan *overhead cost* (biaya tidak langsung untuk memperoleh DPK). Dengan demikian, penetapan margin seperti untuk pembiayaan investasi tetap mempertimbangkan tingkat suku bunga rata – rata perbankan konvensional sebagai kompetitor yang menguasai pasar pembiayaan.

2.1.3.2 Pembiayaan Investasi Bermasalah (NPF)

Pembiayaan bermasalah atau NPF menurut peraturan Bank Indonesia nomor 5/7/BPI/2003/19 Mei 2003 adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan pinjaman. Adapun beberapa penggolongan

¹⁶ Adiwarmarman (2004). Hal 254 - 255

pembiayaan bermasalah sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan kurang lancar, jika terdapat prospek usaha mempunyai potensi pertumbuhan terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan karena kemampuan bayar terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari atau tiga bulan sampai 180 hari atau enam bulan.
2. Pembiayaan digolongkan diragukan, jika terdapat prospek usaha menurun. Kondisi keuangan laba sangat kecil atau negatif dan kemampuan membayar tunggakan sudah mencapai 180 hari hingga mencapai 270 hari.
3. Pembiayaan yang dapat digolongkan dalam katagori macet jika terdapat kondisi prospek usaha sangat diragukan dan sulit pulih kembali. Kondisi keuangan mengalami kerugian yang besar dan kemampuan membayar tunggakan yang telah melampaui 270 hari.

Jadi, definisi pembiayaan bermasalah tidaklah berbeda dengan kredit bermasalah. Sehingga dengan konsep pembiayaan bermasalah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan konsep kredit bermasalah dengan rasionya¹⁷, maka dapat dilihat rasio pembiayaan investasi bermasalah seperti di bawah ini :

$$\text{Rasio Pembiayaan Investasi Bermasalah} = \frac{\text{Pembiayaan Investasi Bermasalah (kurang lancar + diragukan + macet)}}{\text{Total Pembiayaan Investasi}} \times 100\%$$

Pembiayaan investasi bermasalah berarti telah terjadi kegagalan nasabah (dunia usaha) dalam memenuhi kewajibannya atas pokok pembiayaan investasi beserta bagi hasilnya atau tingkat marginnya dan terbagi ke dalam bentuknya yaitu kurang lancar, diragukan dan macet.

¹⁷ Juli, et.al (2002). *Op Cit.* Hal. 86

Penyebab terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah dapat diakibatkan oleh faktor internal bank dan faktor eksternal ataupun internal nasabah. Pengaruh pembiayaan bermasalah ini adalah kesehatan bank menurun karena turunnya profitabilitas (kemampuan menghasilkan laba). Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah menjadi tolak ukur untuk meningkatkan profitabilitas.

Sehingga apabila kasusnya adalah pembiayaan investasi bermasalah meningkat maka efeknya adalah profitabilitas juga akan turun. Dampak selanjutnya yang timbul adalah perbankan syariah akan mulai meningkatkan prudential principle dan bahkan memperlambat pembiayaan investasinya dengan mengalihkan pembiayaannya yang memiliki resiko rendah dan sifatnya jangka pendek. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan pembiayaan investasi bermasalah maka pembiayaan investasi juga akan mengalami penurunan.

Kondisi tersebut sesuai situasi yang mengharuskan NPF sebagai salah satu parameter pengukuran resiko pembiayaan, seperti penetapan standar manajemen resiko di bank umum yang ditetapkan Bank Indonesia seperti melalui kredit bermasalah sebagai parameter pengukuran resiko kredit secara internal untuk menghindari resiko kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya. Bahkan, Bank Indonesia di bulan November tahun 2010 juga telah mengeluarkan peraturan No.12/21/PBI/2010 mengenai rencana usaha (bisnis) bank umum dan unit usaha syariah melalui pertimbangan NPF aktual beserta proyeksinya ke depan.

Kemudian, adapun langkah yang ditetapkan Bank Indonesia untuk meminimalkan potensi kerugian di bank umum dan unit usaha syariah yang disebabkan pembiayaan bermasalah adalah melalui restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki penurunan kemampuan pembayaran, tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September tahun 2008 maka beberapa cara mengenai restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut¹⁸ :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS (Bank umum syariah) dan UUS (unit usaha syariah).
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan BUS ataupun UUS.
 - b. Konversi akad Pembiayaan.
4. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, BUS atau UUS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.4 Inflasi

2.1.4.1 Konsep dan Pengukuran Inflasi

Inflasi di dalam teorinya merupakan kecenderungan kenaikan harga – harga secara umum dan terus menerus akibat kenaikan harga suatu barang yang meluas kepada sebagian besar harga barang lainnya¹⁹.

¹⁸ Bank Indonesia (2008). Surat Edaran Restrukturisasi Pembiayaan Bagi BUS dan UUS. Hal.2

¹⁹ Dornbusch and Stanley (1995). Hal. 38 – 39

Kemudian, inflasi juga memiliki berbagai tingkatan yang terlihat sebagai berikut²⁰ :

- inflasi ringan (dibawah 10 % setahun)
- inflasi sedang (antara 10 -30 % setahun)
- inflasi berat (antara 30 – 100 % setahun)
- hiper inflasi (di atas 100 % setahun)

Tingkat Inflasi adalah perubahan persentase pada tingkat harga²¹ :

$$\text{Tingkat Inflasi (tahun t)} = \frac{\text{Tingkat Harga (tahun t)} - \text{Tingkat Harga (tahun t - 1)}}{\text{Tingkat Harga (tahun t - 1)}} \times 100 \%$$

Secara umum, inflasi diukur dengan beberapa cara, yaitu²² :

- a. Indeks Biaya Hidup (Indeks Harga Konsumen) atau *Consumer Price Index* (CPI)

$$I = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100 \%$$

dimana : I = inflasi

IHK_t = indeks harga tahun t

IHK_{t-1} = indeks harga tahun t-1

Badan Pusat Statistik nasional mengeluarkan angka inflasi di dalam laporan statistik adalah inflasi bulanan dan tahunan. Namun secara teknis statistik, BPS nasional juga mengeluarkan perhitungan inflasi triwulanan yang dikenal dengan inflasi triwulanan point to point (titik per titik). Contohnya adalah sebagai berikut²³ :

$$\text{Inflasi Triwulan I Tahun 2010} = \frac{IHK \text{ Maret 2010} - IHK \text{ Desember 2009}}{IHK \text{ Desember 2009}} \times 100 \%$$

²⁰ Budiono (1996).Hal. 162

²¹ Samuelson and Nordhaus (2004). Hal 382

²² Nopirin (2000). Hal. 25 - 26

²³ BPS (2010). Data Strategis. Hal. 72

b. Indeks Perdagangan Besar (wholesale price index)

Indeks ini dalam perhitungannya memasukan sejumlah barang dalam tingkat perdagangan besar, yang berarti memasukkan bahan mentah dan bahan baku dalam indeks harga.

c. Deflaor GDP²⁴

Deflator GDP (*gross domestic product*) adalah harga dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negara (konsumsi, investasi, pembelanjaan pemerintah, dan ekspor netto) daripada komponen tunggal seperti konsumsi. Indeks ini juga berbeda dari CPI tradisional karena indeks dengan bobot variabel yang memperhitungkan share yang berubah dari barang – barang yang berbeda. Selain itu, ada deflator untuk komponen – komponen GDP, seperti untuk barang investasi, konsumsi pribadi, dll.

Secara khusus di antara konsep perhitungan inflasi yang digunakan, maka negara Indonesia melalui badan pusat statistik menggunakan IHK dalam setiap laporan inflasi periode bulanan maupun tahunan. Inflasi IHK ini juga telah menjadi arah dari kebijakan otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk mengendalikan inflasi, karena inflasi inilah yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas, dan sebagai kondisi yang secara langsung mempengaruhi keputusan dunia usaha dan konsumen. Kemudian, karena inflasi IHK terbentuk atas faktor – faktor yang dapat dikendalikan dan di luar kendali bank Indonesia maka inflasi ini terbagi ke dalam bentuk *core inflation* atau inflasi inti (yang dapat dikendalikan) dan tidak dapat dikendalikan seperti *volatile food Inflation* dan *administered price*.

Core inflation atau inflasi inti adalah inflasi komoditas yang perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental

²⁴ Samuelson and Nordhaus (2004). *Op Cit.* Hal 119

seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum dan lebih bersifat permanen. Inflasi ini dihitung dengan metode *exclusion*, yaitu dengan mengeluarkan secara permanen berbagai komponen barang yang mekanisme pembentukannya terdistorsi, seperti *administered price* dan *volatile food price*²⁵. Berdasarkan inflasi inti inilah Bank Indonesia dapat mengetahui kecenderungan besaran inflasi dalam jangka menengah dan panjang.

Inflasi *volatile food* adalah inflasi komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor – faktor tertentu seperti faktor musim panen, gangguan distribusi, bencana alam dan hama. Sedangkan inflasi *administered price* merupakan inflasi kelompok komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah. Harga *volatile foods* dapat sangat berfluktuasi karena ketergantungan pasokannya sangat tinggi terhadap keadaan cuaca, musim, gangguan hama, dan distribusi. Sementara itu, harga *administered goods* seperti BBM dan listrik banyak ditentukan oleh pemerintah sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut cenderung bersifat sesaat.

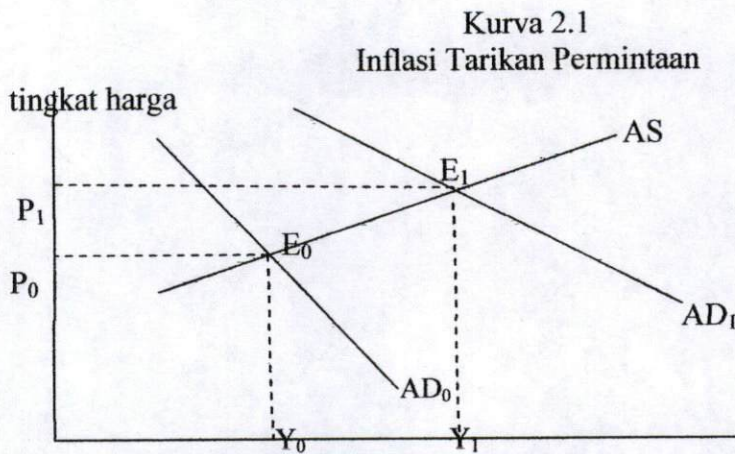
Berbagai bentuk inflasi di dalam realita memang dapat berlaku sebagai *volatile food* dan *administered good inflation* serta *core inflation* dari berbagai penyebabnya, Namun di dalam teori ekonomi, inflasi hanya digolongkan menjadi *supply shock inflation* ataupun *demand pull inflation* yang akan dijelaskan pada sub bab berikut ini.

2.1.4.2 Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi secara teoritis dapat dijelaskan dengan beberapa keseimbangan kurva *agregat demand* dan *agregat supply*. Intinya ada dua jenis faktor yang menyebabkan

²⁵ Bank Indonesia (2004) . "Laporan Tahunan Bank Indonesia 2003".Hal 20

terjadinya inflasi tersebut, yaitu tarikan permintaan dan desakan biaya. Inflasi tarikan permintaan disebabkan oleh agregat demand (permintaan keseluruhan barang dan jasa) lebih besar daripada agregat suply seperti yang tergambar pada Kurva 2.1 berikut ini.



Sumber : Sadono Sukirno (2000), Makroekonomi Modern. Hal. 491

Kurva 2.1 diatas menunjukkan bahwa ketika kurva AD_0 (agregat demand) bergeser ke kanan menjadi AD_1 seperti diakibatkan oleh ekspansi sektor riil maka pendapatan nasional akan bergeser menuju Y_1 sedangkan agregat Suply (AS) atau jumlah barang dan jasa tetap maka terjadi kenaikan harga dari P_0 ke P_1 . Peningkatan harga inilah yang disebut dengan demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Kemudian, hal yang berlaku sebaliknya akan terjadi adalah kondisi deflasi yaitu apabila AD_0 menuju AD_1 dengan tingkat harga sebesar P_2 akibat turunnya pendapatan nasional.

Kondisi inlasi tarikan permintaan di dalam ekonomi Islam oleh Taqiuddin Ahmad dalam Adiwarmarman (2008) disebut juga dengan inflasi natural. Lebih jelasnya, Adiwarmarman kemudian menjelaskan terjadinya natural inflasi dengan menggunakan persamaan keseimbangan uang konvensional berikut ini²⁶.

$$MV = PT = Y,$$

²⁶ Adiwarmarman (2007). Hal. 140

dimana : M = jumlah uang beredar,

V = kecepatan peredaran uang

P = tingkat harga,

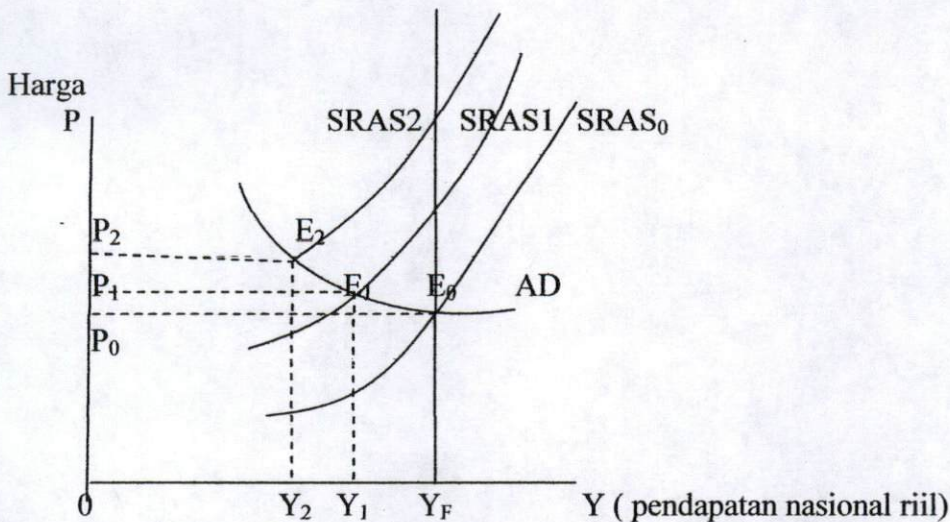
T = jumlah barang dan jasa (kadang juga dipakai notasi Q)

Y = tingkat pendapatan nasional (GDP)

Apabila M dan V tetap, sedangkan T turun maka konsekuensinya adalah P mengalami kenaikan. Kenaikan harga inilah yang disebut sebagai natural inflation (inflasi alami).

Kemudian, inflasi akibat sisi biaya atau *cost push inflation* dapat dilihat pada kurva berikut ini.

Kurva 2.2
Inflasi Tekanan Biaya



Sumber : Sadono Sukirno (2000), Makroekonomi Moderen. Hal 494

Kurva 2.2 merupakan kurva inflasi akibat desakan biaya seperti akibat kenaikan harga bahan bakar. Jadi, pada mulanya keseimbangan perekonomian dicapai pada titik E_0 , yang menggambarkan keadaan kesempatan kerja penuh (pendapatan nasional adalah Y_F) dan tingkat harga adalah P_0 . Sehingga, seperti dengan terjadinya kenaikan harga bahan bakar yang merupakan sumber energi penting dalam industri dan alat

pengangkutan maka terjadi pula peningkatan biaya produksi yang terlihat dari bergesernya kurva penawaran jangka pendek ($SRAS_0$) ke $SRAS_1$ yang selanjutnya berdampak kepada harga yang meningkat ke P_1 dan turunnya pendapatan nasional). Hal inilah yang dikatakan sebagai inflasi desakan biaya.

Bahkan dengan terjadinya peningkatan harga sebesar P_1 , maka yang terjadi adalah para pekerja menuntut kenaikan upahnya sehingga terjadi inflasi yang lebih parah dengan naiknya harga ke P_2 dan pendapatan nasional semakin merosot. Kemudian, Kondisi yang lebih memberatkan adalah stagflasi atau masalah kemunduran ekonomi (stagnasi) dan inflasi yang secara serentak dihadapi.

Kemunduran ekonomi yang disebabkan oleh inflasi lazimnya memang terjadi akibat cost push inflation, dengan bergesernya seperti kurva $SRAS_0$ ke kiri menuju $SRAS_1$ yang penyebabnya seperti kenaikan harga input produksi, dan tidak seimbangnnya produktivitas labor terhadap upah. Sedangkan jika tingkat produktivitas produksi semakin tinggi, maka penurunan biaya akan terjadi, terutama apabila diiringi dengan peningkatan teknologi produksi, sehingga pendapatan nasional (nilai PDB riil) meningkat dan harga akan turun.

2.1.4.3 Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah

Secara teori, inflasi akan mengerosi atau mengurangi daya beli uang atas barang dan jasa sehingga yang terjadi adalah dua kemungkinan yaitu sesuai para ekonom Islam inflasi akan mengorbankan investasi ke arah produktif dan yang kedua adalah menjadikan keuntungan dari pembiayaan investasi menjadi rendah²⁷.

Dengan demikian, inflasi dapat menjadi ekspektasi penting perbankan syariah atas keuntungan yang diharapkan di masa depan, walaupun tidak adanya informasi yang pasti kondisi yang terjadi di masa depan. Lebih lanjut, inflasi yang mengurangi

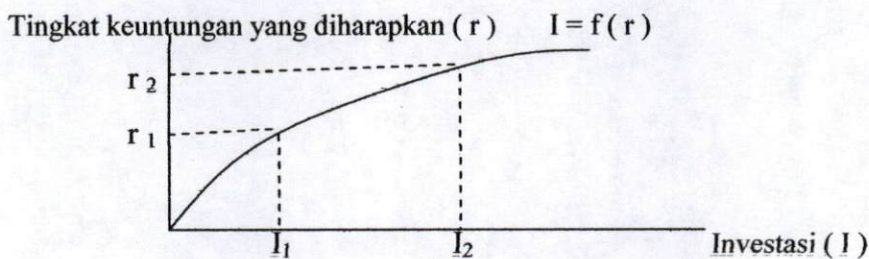
²⁷ Adimarwan (2007). *Op Cit.* Hal 139

keuntungan yang diharapkan perbankan syariah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hamid (1995) dalam skema pemenuhan investasi berbagi hasil dan resiko²⁸.

Hamid (1995) dalam teorinya mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemilik modal (capitalist or financiers) atas investasi adalah $S_m m - \pi$, yang berarti keuntungan dari pemilik modal adalah setelah share untuk pemilik modal (S_m) x total keuntungan dari perusahaan atau pengelola investasi (m) dikurangi Inflasi (π). Sedangkan keuntungan yang diperoleh pengelola investasi adalah $(1 - S_m) m$ atau setelah dikurangi share keuntungan dari pemilik modal. Jadi, inflasi akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh pemilik modal sepertihalnya perbankan syariah sebagai pemilik modal dalam pembiayaan investasinya.

Hal tersebut jika diperhatikan dari konsep Fahim Khan (2004) dalam kurva 2.3 jugalah sesuai, bahwa investasi syariah di dalam Islam dipengaruhi atas harapan keuntungan yang diharapkan dari kegiatan Firm (perusahaan). Sedangkan kondisi yang berlaku secara luas adalah inflasi mempengaruhi keuntungan pengelola investasi (dunia usaha) dan pemilik modal. Sehingga dengan kondisi inflasi yang dapat menyebabkan turunnya keuntungan dunia usaha dan perbankan syariah maka inflasi tersebut dapat menjadi ekspektasi negatif dari harapan keuntungan dunia usaha yang turun dan pada akhirnya juga mengakibatkan pembiayaan investasi juga mengalami penurunan.

Kurva 2.3
Hubungan antara Tingkat Keuntungan yang diharapkan dan Investasi



Sumber : Nurul Huda et al (2008). Hal 5

²⁸ Hamid (1995). Hal 57 -58

Kurva di atas adalah kurva yang dikemukakan Fahim Khan (2004) di dalam Nurul Huda et al (2008) dengan makalahnya yang berjudul *A simple model of Income determination, growth and economic development in the perspective of an interest free economy*, yang menyatakan bahwa permintaan investasi (*investment demand*) ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected profits*) yang oleh perbankan syariah tingkat keuntungan yang diharapkan atas pembiayaan investasi tergantung oleh :

- total profit yang diharapkan dari kegiatan firm (*enterpreneurial*), dan
- *share in profit* yang diklaim oleh pemilik dana.

Kemudian, kondisi tersebut juga sesuai yang dikemukakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bahwa inflasi telah menjadi dasar dan ekspektasi investor dalam setiap kegiatan investasi riil.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Inflasi Sebagai Determinan Investasi

Berdasarkan studi Abbas (2004), inflasi merupakan salah satu faktor penentu (*determinan*) investasi riil sektor swasta. Studi yang dilakukannya tersebut adalah untuk kasus di negara Iran. Jadi, Inflasi yang dianalisa oleh Abbas melalui teknik kointegrasi mempunyai hasil bahwa di dalam jangka panjang inflasi akan mempengaruhi investasi.

Studi yang dilakukan Abbas (2004) meskipun membuktikan bahwa inflasi berpengaruh negatif kepada investasi riil di negara Iran, namun di Indonesia tidaklah berlaku demikian. Hal ini seperti hasil studi yang dilakukan oleh Isa Salim (2006) dan Wiwin (2008). Kajian Isa Salim (2006) adalah mengenai analisis faktor – faktor ekonomi makro yang mempengaruhi investasi pada sektor pertanian di Indonesia tahun 1984 –2004. Hasilnya adalah inflasi tidak mempunyai pengaruh atau tidak signifikan

atas realisasi investasi sektor pertanian. Hasil tersebut diperoleh melalui uji regresi linear berganda.

Kajian selanjutnya yang memberikan penjelasan mengenai determinan investasi di Indonesia adalah Wiwin Setyari et.al (2008). Kajiannya berfokus pada keseimbangan pergerakan investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan data tahun 1980 – 2005 dan dengan teknik analisis kointegrasi dan error correction model (ECM) Hasil pengujiannya juga membuktikan bahwa inflasi tidak ditemukan pengaruhnya atau tidak signifikan atas investasi meskipun memiliki arah positif yang dikarenakan inflasi masih batas toleransi dan kenaikan harga mendahului kenaikan upah. Wiwin dalam studinya menginterpretasikan bahwa masyarakat dan produsen sudah telalu jenuh dengan ekspektasi yang dilakukan atas dasar inflasi, sehingga ada tidaknya inflasi menjadi kondisi yang dianggap biasa.

2.2.2 Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan Pembiayaan Perbankan

Pratin dan Akhyar Adnan (2005) dalam studinya yang menganalisa pengaruh NPF terhadap pembiayaan BMI (Bank Muamalat Indonesia) menemukan hasil bahwa NPF mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Artinya adalah NPF yang merupakan kebijakan kredit atau analisa pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Kemudian, Pratin dan Akhyar (2005) juga memberikan penjelasan bahwa tidak berpengaruhnya NPF terhadap pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia dikarenakan adanya permintaan pembiayaan yang cukup tinggi, penanganan pembiayaan bermasalah dengan reschedulling ataupun reconditioning, dan kecilnya peluang moral Hazard.

Meydianawathi (2007) dalam studinya mengenai analisis pengaruh NPL sebagai perilaku penawaran kredit perbankan kepada sektor UMKM di Indonesia (2002 – 2006) memberikan hasil bahwa dengan tingkat signifikansi 10 persen maka

NPLs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi. NPLs yang tinggi akan menyebabkan penawaran kredit investasi ke sektor UMKM berkurang. Tetapi apabila NPLs rendah maka akan meningkatkan penawaran kredit investasi ke sektor ini. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Medyanawati bahwa ketika NPF tinggi maka menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit juga semakin berkurang.

2.2.3 Inflasi dan Pembiayaan Perbankan

Sayed dan Nezamadin Makiyan (1995) dalam studinya yang menganalisa penawaran pinjaman perbankan Islam di Iran dari triwulan I tahun 1984 hingga triwulan IV tahun 1994 diperoleh hasil bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan atas penawaran pembiayaan perbankan syariah di Iran. Kondisi ini terjadi di tengah angka inflasi tahunan yang selalu di atas dua digit dalam kisaran 17 hingga 35,2 persen dan hanya pada tahun 1984, 1985, dan 1990 berada single digit. Berdasarkan pengujian empiris, terlihat adanya hubungan yang positif dan signifikan antara inflasi dan penawaran pinjaman (supply of loans). Hal tersebut lebih lanjut menurut intepretasi dari Sayed dan Nezamadin (1995) dapat terjadi karena perbankan Islam di Iran tetap menyediakan pembiayaannya di tengah inflasi sesuai kebutuhan keuangan sektor riil. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan adanya hubungan yang tidak signifikan antara rata – rata tingkat pengembalian pinjaman (rate of return on loans) terhadap suply of loans.

Kajian perbankan Islam di Iran yang memperlihatkan hubungan positif inflasi atas penawaran pinjaman tentu juga dimungkinkan dapat berlaku atau tidak di Indonesia. Jika dilihat saja pada kajian empiris kasus perbankan konvensional yang terbukti bahwa inflasi tidak akan selalu mempengaruhi besaran kredit dan berhubungan positif ataupun negatif maka untuk kasus pembiayaan perbankan syariah dapatlah juga

berlaku demikian. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus perbankan konvensional seperti studi Muhamad Iskandar (2006) yang menganalisa pengaruh laju inflasi (X_1) terhadap penyaluran kredit di propinsi Sumatera Utara (Y) dengan metode pengujian regresi linear berganda dan model yang ditransformasikan ke dalam logaritma, yang kemudian ditemukan bahwa laju inflasi mempunyai arah negatif terhadap penyaluran kredit tetapi tidak berpengaruh signifikan dalam degree of freedom atau tingkat kepercayaan 95 %. Artinya inflasi belum dapat menjelaskan secara baik dan sesuai kelaziman di dalam mempengaruhi penyaluran kredit.

Kemudian, di dalam situasi yang berbeda yakni sesuai studi Mochamad (2007) hubungan inflasi dan permintaan kredit bank umum di propinsi Jawa Tengah melalui model log linear diperoleh estimasi bahwa inflasi tersebut tidak berpengaruh kepada permintaan kredit. Hal ini dikarenakan dunia usaha sangat membutuhkan kredit tanpa terpengaruh tinggi dan rendahnya inflasi. Lebih lanjut, kondisi inflasi yang tidak berpengaruh atas permintaan kredit juga berlaku sama pada kajian Aryaningsih (2008) yang menganalisa pengaruh inflasi terhadap permintaan kredit di bank pembangunan daerah Kediri pada periode perekonomian tahun 2003 hingga 2006.

Berdasarkan kasus perbankan konvensional dapatlah dilihat bahwa inflasi dapat mempengaruhi kredit meskipun tidak dapat dijelaskan dalam tingkat kepercayaan 95% dan di kasus lain inflasi terbukti tidak mempengaruhi besaran kredit. Sehingga, hal ini dapat menjadi kondisi relatif untuk kasus pembiayaan perbankan syariah. Namun, dengan memperhatikan kajian Priyo dan Tarsidin (2007) maka kemungkinan inflasi berpengaruh negatif atas pembiayaan perbankan syariah yang ditujukan untuk investasi dapatlah terjadi.

Kajian Priyo dan Tarsidin (2007) telah membahas bahwa peningkatan inflasi yang diuji dengan angka signifikansi sebesar sepuluh persen akan meningkatkan resiko

usaha hampir di seluruh sektor ekonomi di Indonesia dengan besaran yang relatif tinggi. Resiko tersebut diartikan sebagai turunnya volume penjualan dan profitabilitas perusahaan yang bermuara kepada default (kebangkrutan). Keadaan tersebut dapatlah digambarkan pada perusahaan yang mempunyai permintaan produk bersifat elastis.

Kondisi yang dianalisa dalam kajian Priyo dan Tarsidin tersebut memberikan makna bahwa dunia usaha yang akan melakukan investasi dapatlah terpengaruh oleh inflasi. Hal ini dikarenakan inflasi akan mengurangi permintaan aktual output yang berarti produksi yang dihasilkan akan mengalami penyesuaian dan barang modal (investasi) terpakai untuk produksi akan berada di bawah kapasitasnya. Oleh karena itu kebutuhan dunia usaha untuk pembiayaan investasi tentu saja dinilai tidak tepat, sehingga penyerapan dana investasi seperti yang ada di perbankan syariah tidak dapat dilakukan oleh dunia usaha.

2.2.4 Tingkat Margin dan Pembiayaan Perbankan Syariah

Studi yang dilakukan oleh Pratin dan Akhyar Adnan (2005) atas pembiayaan BMI (Bank Muamalat Indonesia) memperlihatkan bahwa tingkat margin yang disebut juga sebagai mark up keuntungan untuk bank syariah melalui akad jual beli tidak memiliki hubungan walaupun mempunyai arah negatif. Kondisi ini lebih lanjut dijelaskan oleh Pratin dan Akhyar Adnan karena nasabah pembiayaan di BMI memiliki pemikiran kritis atas sistem syariah tanpa mepedulikan besarnya tingkat margin. Kemudian penetapan tingkat margin juga dirasakan masih di bawah ataupun setingkat dengan rata – rata bunga kredit di pasar perbankan dan permintaan pembiayaan di BMI memang cukup tinggi.

2.3 Hipotesis

Hipotesa yang akan diuji kebenarannya di dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga adanya hubungan yang positif antara DPK dengan jumlah pembiayaan investasi perbankan syariah.
2. Diduga adanya hubungan yang negatif antara tingkat margin terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah.
3. Diduga adanya hubungan yang negatif antara pembiayaan investasi bermasalah dengan jumlah pembiayaan investasi perbankan syariah.
4. Diduga adanya hubungan yang negatif antara inflasi dengan jumlah pembiayaan investasi perbankan syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Variabel

Komposisi variabel di dalam studi ini tidaklah berbeda dengan studi pada umumnya yang berlaku. Variabel dikategorikan bersifat dependen (terikat) dan independen (bebas). Dana pihak ketiga (DPK), tingkat margin pembiayaan investasi, pembiayaan investasi bermasalah, dan inflasi adalah variabel independen, sedangkan pembiayaan investasi adalah variabel dependen. Komposisi variable tersebut memiliki tujuan untuk melihat pengaruh variable independen terhadap dependen, sekaligus memberikan arah bahwa studi ini merupakan penelitian induktif yang mempunyai inti untuk membuktikan hipotesis bahwa DPK, NPF investasi, dan inflasi berpengaruh kepada pembiayaan investasi.

Pembiayaan investasi di dalam studi ini merupakan pembiayaan yang ditujukan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan investasi dunia usaha melalui akad mudharabah, musyarakah, ataupun murabahah. Kemudian, dana pihak ketiga adalah total dana yang berhasil dihimpun perbankan syariah melalui produk simpanan (titipan (wadiah) dan mudharabah), giro wadiah dan deposito investasi mudharabah. Selanjutnya, tingkat margin pembiayaan investasi adalah dalam bentuk rata – rata yang berlaku secara umum pada perbankan syariah di Indonesia atau meliputi tingkat margin rata - rata pembiayaan investasi di bank umum dan unit usaha syariah.

Pembiayaan investasi bermasalah adalah dalam bentuk rasio yang merupakan kegagalan nasabah pembiayaan investasi (dunia usaha) dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pokok pembiayaan beserta bagi hasilnya untuk perbankan syariah yang dimulai dari bentuknya kurang lancar, diragukan, dan macet. Khusus untuk inflasi,

digunakanlah perubahan indeks harga konsumen (IHK) yang memperlihatkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Kemudian di sisi perlakuan data, nantinya variabel dependen yaitu pembiayaan investasi dan variable independen yaitu DPK, tingkat margin pembiayaan investasi, dan pembiayaan investasi bermasalah di dalam studi datanya berasal dari bulan akhir di setiap periode triwulanan kalender. Sedangkan inflasi triwulanan diperoleh dari perhitungan inflasi triwulanan point to point yang dikeluarkan BPS nasional.

Khusus untuk data tingkat margin pembiayaan investasi dan pembiayaan investasi bermasalah yang pada triwulan I,II,III tahun 2006 dan 2007 tidak ada angka realnya dalam statistik perbankan syariah Indonesia, maka dilakukan teknik interpolasi (menemukan nilai hampiran) linear sesuai dengan titik data real tingkat margin dan pembiayaan investasi bermasalah di triwulan IV tahun 2005, 2006, dan 2007 yang membentuk garis linear²⁹. Rumus interpolasi linear yang digunakan tersebut adalah³⁰ :

$$Y = Y_n + \frac{Y_{n+1} - Y_n}{X_{n+1} - X_n} (X - X_n)$$

Jadi, rumus di atas digunakan untuk menginterpolasi data triwulanan pada tahun 2006 dan 2007 untuk tingkat margin pembiayaan investasi dan pembiayaan investasi bermasalah. Keterangan untuk studi dari persamaan interpolasi di atas adalah :

Y = nilai tingkat margin atau pembiayaan investasi bermasalah yang dicari.

Y_n = nilai tingkat margin atau NPF investasi di triwulan IV tahun 2005

Y_{n+1} = nilai tingkat margin atau NPF investasi triwulan IV tahun 2006

X = 1,25 atau periode data triwulan I tahun 2006 yang di dalam garis interpolasi nilai pada sumbu x diberi sebesar 1,25

²⁹ Agus (2005) dan Zakaria (2010)

³⁰ Agus (2005). Hal. 16

$X_n = 1$ atau periode data triwulan IV tahun 2005 yang kemudian menjadi periode pertama dalam garis interpolasi.

$X_n + 1 = 2$, atau periode data triwulan IV tahun 2006 yang kemudian menjadi periode terakhir dalam garis interpolasi.

Sehingga, untuk mencari data triwulan II dan III hanya dengan merubah nilai X yaitu 1,5 dan 1,75. Namun, perhitungan ini hanya berlaku untuk dua titik saja seperti untuk mencari data tahun 2005 dengan 2006. Oleh karena itu, untuk mencari data triwulan I, II, dan III tahun 2007 caranya sama saja dan yang membedakannya hanyalah titik data yaitu antara tahun 2006 dengan tahun 2007.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Studi ini menggunakan data sekunder yang berbentuk time series dari triwulan IV tahun 2005 hingga triwulan III tahun 2010. Periodisasi data penelitian tersebut dipandang cukup mewakili sejauh mana pengaruh variabel – variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan dalam studi ini diperoleh dari :

1. Laporan statistik bulanan dan tahunan pembiayaan investasi, DPK, tingkat margin rata - rata pembiayaan investasi dan pembiayaan investasi bermasalah (non lancar) perbankan syariah di kantor Bank Indonesia Padang dan Server Bank Indonesia.
2. Laporan tahunan perekonomian Indonesia, statistik ekonomi keuangan nasional, dan statistik perbankan Indonesia di Bank Indonesia Padang dan dari Server Bank Indonesia.
3. Laporan bulanan inflasi nasional bulanan dari server BPS nasional dan berbagai buku di BPS Sumatera Barat.

3.3 Model Analisis Data dan Penelitian

Analisa pengaruh DPK, tingkat margin pembiayaan investasi, pembiayaan investasi bermasalah (NPF investasi), dan inflasi terhadap pembiayaan investasi perbankan syariah adalah melalui model regresi berganda (*multiple regression*). Kemudian, untuk menentukan model persamaan regresinya, maka dapat dilakukan terlebih dahulu eksplorasi data seperti memplotkan nilai pengamatan pembiayaan investasi dengan beberapa variabel independen pada bidang kuadran dua yang dikenal sebagai diagram pencar (*scatter plot*)³¹.

Namun dengan tetap memperhatikan bahwa *scatter plot* yang dibentuk terkadang tidak memberikan informasi yang jelas kemungkinan hubungan ketidaklinearan (non linearitas) dan dengan pertimbangan bahwa pembentukan model regresi adalah berdasarkan dugaan dari teori yang berlaku dari variabel dana pihak ketiga, tingkat margin pembiayaan investasi, pembiayaan investasi bermasalah, dan inflasi terhadap variabel dependen, maka model regresi yang digunakan di dalam studi mengarah kepada model regresi linear berganda, yang kemudian dalam pembentukan persamaan pembiayaannya merujuk kepada studi terdahulu Sayed dan Nezamaddin (1995).

Persamaan pembiayaan dalam studi Sayed dan Nezamaddin (1995) adalah :

$$SL = f (R, TD, I) \dots\dots\dots (3.1)$$

di mana : SL = Suply of Loans (penawaran pembiayaan)

TD = Dana Pihak Ketiga

I = Inflasi

R = tingkat rata – rata pengembalian pembiayaan

³¹ Bambang (2009). Hal.21-22

Berdasarkan persamaan (3.1) di atas dan kepentingan studi, maka R sebagai tingkat rata – rata pengembalian pembiayaan digantikan dengan tingkat margin pembiayaan investasi yang bernetasikan (TM) dan pembiayaan investasi bermasalah (NPFi). Sehingga, jika SL (*suply of loans*) digantikan menjadi PI (pembiayaan investasi), dan notasi inflasi (I) dirubah menjadi (P) ,maka fungsi pembiayaan investasi di dalam studi ini adalah :

$$PI = f (DPK , TM, NPFi , P) \dots\dots\dots (3.2)$$

PI = pembiayaan investasi (Milliar Rupiah)

DPK = dana pihak ketiga (Milliar Rupiah)

TM = tingkat margin pembiayaan investasi.(%)

NPFi = pembiayaan investasi bermasalah (%)

P = Inflasi atas dasar IHK (%)

Secara matematis, model regresi berganda dari fungsi pembiayaan investasi perbankan syariah adalah sebagai berikut :

$$PI_t = \beta_0 + \beta_1 DPK_t + \beta_2 TM_t + \beta_3 NPFi_t + \beta_4 P_t + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

Pembiayaan investasi (PI) dalam persamaan matematis (3.3) di atas ditentukan oleh variabel DPK, tingkat margin pembiayaan investasi (TM), pembiayaan investasi bermasalah (NPFi), inflasi (P) dan variable lain diluar model (μ_{it}).

Kemudian, parameter (β_1 hingga β_4) ditaksir menggunakan metode untuk mengestimasi parameter regresi sederhana, yaitu OLS (ordinary least square) atau metode kuadrat terkecil³². Metode OLS tersebut adalah metode untuk mencapai penyimpangan atau error yang minimum, yang berarti model regresi yang terestimasi dekat sekali dengan model regresi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, setelah dilakukan estimasi maka model regresi linear berganda tersebut tetap akan melalui

³² Nachrowi dan Hardius (2005). Hal. 83

pengujian permodelan agar interpretasi dari setiap koefisien variabel independen tepat, yaitu melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinieritas. Penjelasan mengenai pengujian ini nantinya akan secara langsung dibahas dalam hasil regresi di BAB V.

Selanjutnya untuk pengujian hipotesis studi, maka terlebih dahulu perlu diperiksa model regresi yang terestimasi cukup baik atau tidak melalui ukuran *goodness of fit* (R^2) yang merupakan ukuran seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data yang diamati atau ukuran dari kemampuan variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel terikat (dependen)

Rumus R^2 (*goodness of fit*)³³ :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

dimana : ESS = *Explained of Sum Squares* (variasi dari garis regresi yang dibuat)

TSS = *Total Sum of Squares* (variasi dari data)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengujian pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen (uji F) dan pengujian secara parsial (individu) setiap variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t (t – test) karena data observasi kecil dari tiga puluh ($n \leq 30$).

Uji t (t – test) digunakan untuk melihat pengaruh masing – masing variabel independen secara individu yaitu dana pihak ketiga (DPK), tingkat margin pembiayaan investasi, pembiayaan investasi bermasalah, dan inflasi terhadap variabel dependen (pembiayaan investasi). Bentuk dari rumus pengujian t adalah sebagai berikut

$$\text{Rumus } t\text{-test}^{34} : t = \frac{\beta_i}{SE(\beta_i)}$$

³³ *Op.Cit.* Hal.33

³⁴ *ibid.* Hal 25

Pengujian Hasil estimasi t_0 (t -test) dapat dilakukan melalui software statistik seperti SPSS yang nantinya akan dibandingkan dengan t tabel (dalam taraf degree of freedom 95 persen atau α sebesar 0,05) dengan derajat bebas adalah jumlah sampel dikurang dua ($db = n-2$). Apabila (t - test) lebih besar dari (t - tabel) maka hipotesis diterima dan apabila (t - test) lebih kecil dari (t - tabel) maka hipotesis ditolak.

Sedangkan, untuk pengujian secara simultan (keseluruhan) variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakanlah uji F, yang dapat diestimasi melalui software statistik seperti SPSS. Hasil estimasi tersebut akan dibandingkan dengan F tabel (dalam taraf degree of freedom 95 persen atau α sebesar 0,05) sesuai ketentuannya. Jadi, apabila F- test lebih besar dari F - tabel maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen berpengaruh kepada variabel dependen.

Rumus F test³⁵ :

$$F_0 = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

³⁵ Iqbal (2004). Hal.99

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

4.1 Perkembangan Pembiayaan

Perbankan syariah sejak tahun 1992 telah hadir sebagai bagian dari Industri perbankan nasional. Sejak saat itulah perbankan ini memberikan peran positifnya di dalam perekonomian di tengah dominasi kredit perbankan konvensional. Kemudian, dengan berlalunya krisis tahun 1997 / 1998 dan dengan kinerja intermediasi perbankan konvensional yang menurun seperti terlihat dari angka LDR (*loan deposit ratio*) di tabel 4.1 sejak tahun 2005 yang masih di bawah 80 persen maka kinerja intermediasi yang dihasilkan perbankan syariah yaitu seperti FDR (*financing deposit ratio*) di atas 80 persen di tahun 2005 semakin memberikan bukti bahwa perbankan syariah bukanlah sekadar bank yang berorientasi bisnis namun juga perbankan yang memang serius mengedepankan fungsi intermediasinya.

Tabel 4.1
LDR Perbankan Konvensional
Tahun 2005 – Triwulan III 2010

	2005	2006	2007	2008	2009	T3 2010
LDR (%)	64,7	64,7	69,2	77,2	72,88	77,06

Sumber : Bank Indonesia (2008). Laporan Perekonomian Indonesia. Hal 116
Bank Indonesia (2010). Statistik Perbankan Indonesia Bulan Juni. Hal. 25

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa LDR perbankan konvensional hingga tahun 2008 belum mencapai angka 80 persen, sedangkan pada tabel 4.2 berikut ini dapat dilihat bahwa FDR perbankan syariah seperti sejak tahun 2005 saja telah mencapai angka di atas 80 persen, yang juga berarti bahwa kinerja intermediasi yang baik dan menjadi perbankan yang tergolong sehat tidaklah sulit dicapai sesuai dengan peraturan PBI No.6/10/PBI/2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Tabel 4.2
FDR Perbankan Syariah
Tahun 2005 – Triwulan III 2010

	2005	2006	2007	2008	2009	T3 2010
FDR (%)	97,75	98,90	99,76	106,66	89,20	95,40

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bulan September 2010

Kinerja intermediasi perbankan syariah di Indonesia yang tergolong baik dengan angka FDR di atas 80 persen sesungguhnya juga tidak berbeda dengan kondisi di berbagai negara lainnya, yang memperlihatkan bahwa kinerja intermediasi yang baik memang demikian adanya dan berlaku umum di dalam industri perbankan Islam.

Tabel 4.3
Kondisi Umum FDR Perbankan Syariah di Berbagai Negara
Tahun 2001 dan 2004

No	Perbankan	Pembiayaan	DPK	FDR (%)	Keterangan
1	Perbankan Syariah Bahrain	823 Million USD	878 Million USD	93,77	Annual report 2001
2	Perbankan Syariah Malaysia	43.606 Million RM	50.796 Million RM	85,85	BNM report May 2004
3	Perbankan Syariah Indonesia	5.860 Billion Rp	6.622 Billion Rp	88,49	BI report Jan 2004

Sumber : Bank Indonesia (2004), Laporan Perbankan Syariah. Hal.14

Meskipun demikian, situasi perbankan syariah yang mengutamakan intermediasi jika dilihat berdasarkan prosesnya tentu tidak akan berdiri sendiri tetapi memang telah diupayakan oleh otoritas moneter seperti dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 sebagai landasan hukum perbankan syariah tersebut untuk berkembang. Kemudian, hal tersebut juga didukung dengan target pengembangan yang ditetapkan otoritas moneter dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang³⁶. Bahkan, otoritas moneter juga telah mengeluarkan peraturan yang tegas atas bank syariah yang memiliki FDR di bawah 80 persen akan dikenakan kenaikan GWM atau giro wajib minimum yang dikaitkan dengan DPK tanpa memperoleh jasa giro

³⁶ Bank Indonesia (2000). Laporan Perekonomian Indonesia (LPI). Hal 170.

sesuai syariat Islam³⁷. Sehingga, kebijakan tersebut pada akhirnya juga telah mengurangi dampak negatif excess likuiditas, memperbesar kinerja intermediasi, dan menaikkan cost of fund dimungkinkan dapat dihindari oleh perbankan syariah.

Selanjutnya, berbagai pengembangan juga dilakukan atas perbankan syariah seiring dengan penetapan berbagai regulasi yang telah terlaksana. Pengembangan jangka pendek dilakukan pada tahun 2002 hingga 2004 dengan tujuan menempatkan bank syariah sedemikian rupa sebagai alternatif bank disamping bank konvensional. Kemudian dalam jangka menengah tahun 2004 hingga 2008 dilakukan pengembangan agar bank syariah lebih berperan dalam mendorong sektor riil. Sedangkan tujuan pengembangan jangka panjang di tahun 2006 hingga 2011 adalah menjadikan bank syariah menjadi lebih efisien dan diharapkan dapat menjadi beroperasi secara internasional.

Jika dilihat target pengembangan perbankan syariah dalam jangka menengah yaitu di tahun 2004 hingga 2008 yang berfokus kepada peningkatan peran perbankan syariah ke sektor riil maka dapat dilihat bahwa hal tersebut belumlah sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui tabel 4.4 yang ditandai dengan mengecilnya porsi pembiayaan investasi dibandingkan pembiayaan modal kerja dan konsumsi. Padahal, pembiayaan investasi adalah sumber pemenuhan investasi dunia usaha yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah (value added) dalam perekonomian dan dapat menjadi jalan untuk peningkatan kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja sesuai aktivitas investasi. Sehingga, meskipun pembiayaan investasi perbankan syariah tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan dominasi kredit perbankan konvensional tetapi kondisi ini tetaplah tidak diharapkan terus terjadi hingga pada saat ini.

³⁷ Bank Indonesia (2004). Laporan Perbankan Syariah (LPS). Hal 12-14

Tabel 4.4
Share Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, dan Konsumsi
Triwulan III 2005 – Triwulan III 2010

Jenis Pembiayaan	Triwulan III 2005	Triwulan IV 2005	Triwulan IV 2006	Triwulan IV 2007	Triwulan IV 2008	Triwulan IV 2009	Triwulan II 2010	Triwulan III 2010
Share Investasi (%)	27,61	28,08	21,4	20,2	20,7	21,2	20,1	19,9
Share Modal Kerja (%)	53,77	52,31	50,9	56,0	53,8	48,8	49,9	48,7
Share Konsumsi (%)	18,62	19,61	27,7	23,8	25,5	30,0	30,0	31,4

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Bulanan Perbankan Syariah Tahun 2005 – Juni 2010

Share pembiayaan investasi berdasarkan tabel di atas memang terlihat lebih rendah dari modal kerja dan konsumsi, walaupun secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dari kredit investasi perbankan konvensional seperti yang terlihat pada tabel 4.5. Namun, secara besaran (nilai nominal) haruslah diakui bahwa pembiayaan tersebut tetap tidak mampu menyaingi nilai kredit investasi yang mendominasi pasar pembiayaan. Sehingga, pembiayaan investasi perbankan syariah secara sekilas memang dapat diperkirakan sangat sulit untuk direalisasikan dari yang seharusnya berlaku ideal di dalam perekonomian.

Tabel 4.5
Pembiayaan Investasi Perbankan Syariah dan Kredit Investasi Perbankan Konvensional
Triwulan IV 2005 – Triwulan III 2010

Periode	Pembiayaan Investasi (Milliar Rupiah)	Pertumbuhan Pembiayaan Investasi (%)	Kredit Investasi (Milliar Rupiah)	Pertumbuhan Kredit Investasi (%)
T4 2005	4.287,19	-	134.400	-
T4 2006	4.373,73	2,02	151.209	12,51
T4 2007	5.640,00	28,95	186.218	23,15
T4 2008	7.907,00	40,19	255.900	38,45
T4 2009	9.955,00	25,9	297.939	16,42
T2 2010	11.233,00	12,84	336.898	13,07
T3 2010	12.120,00	7,90	327.668	-2,74

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah Juni 2010

Nilai pembiayaan investasi yang jika dihitung hanya sekitar 3,19 persen dari nilai kredit investasi perbankan konvensional seperti di triwulan empat tahun 2005 dan di triwulan kedua tahun 2010 sebesar 3,33 persen inilah yang memberikan fakta bahwa kontribusi yang mampu diberikan perbankan syariah ke dalam perekonomian juga sangat kecil. Bahkan, kondisi ini juga diperberat dengan karakter dunia usaha dan deposito (unit surplus) secara real yang berupa nasabah mengambang (floating).

Tabel 4.6

Nasabah Pasar Pembiayaan dan Penghimpunan Dana Perbankan Syariah di Indonesia

No.	Bentuk Nasabah	Keterangan
1.	Mengambang (floating)	Dunia usaha akan cenderung memilih biaya paling rendah atau return yang paling tinggi. Sehingga pemilihan bank syariah akan terjadi jika selisih return yang diharapkan dari pembiayaan lebih besar 2-3 persen dari bank konvensional. Deposito akan memilih produk pendanaan bank syariah apabila return yang ditawarkan lebih tinggi 2-3 persen dari bank konvensional
2.	Loyalis Syariah	Dunia usaha akan tetap memilih produk pembiayaan perbankan syariah walaupun rate untuk bank lebih tinggi 1-2 persen dari tingkat suku bunga bank konvensional. Deposito akan tetap memilih produk pendanaan perbankan syariah walaupun return yang diberikan bank lebih rendah 1-2 persen dari bank konvensional.

Sumber : Karim Consulting (2005) dalam Nuenung (2006). Hal 865 - 866

Berdasarkan tabel 4.6, perbankan syariah dalam pembiayaannya memang selalu menghadapi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan karena adanya dunia usaha dan deposito (unit surplus) yang bersifat floating atau berorientasi profit daripada bersifat loyalis syariah, yang pada akhirnya dapat memperkecil jumlah realisasi pembiayaan perbankan syariah dan dapat berlaku sama dengan pembiayaan investasi perbankan syariah.

Secara spesifik, pembiayaan investasi akan diuraikan lebih lanjut di sub bab berikutnya. Namun sesuai substansi studi, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai dana pihak ketiga secara umum yang di dalam studi terkatagori sebagai sumber pembiayaan investasi.

4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga yang mengawali pembahasan mengenai pembiayaan investasi adalah berdasarkan posisi pentingnya sebagai sumber pembiayaan investasi. Secara umum, adapun bentuk dari nasabah pendanaan perbankan syariah telah terlihat secara umum di tabel 4.6.

Kondisi nasabah yang terbagi ke dalam bentuk floating memang pada akhirnya telah menjadi permasalahan serius di sisi penghimpunan dana perbankan syariah. Hal ini selanjutnya tentu juga sangat mengkhawatirkan, terlebih jika nasabahnya seperti korporasi yang apabila mengalihkan dananya ke bank konvensional dengan tawaran *return* (pengembalian) yang lebih tinggi, maka diperkirakan kondisi ini dapat memberikan tekanan pada likuiditas bank syariah³⁸.

Gambaran umum mengenai dana pihak ketiga dapat dilihat secara umum pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7
Perkembangan Triwulanan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Triwulan IV Tahun 2005 – Triwulan III 2010

	T4 2005	T1 2006	T2 2006	T3 2006	T4 2006	T1 2007	T2 2007	T4 2007	T4 2008	T4 2009	T2 2010	T3 2010
DPK (Triliun Rupiah)	15,5	14,9	16,4	17,9	20,6	21,8	22,7	28,01	36,8	52,2	58,0	63,9

Sumber : Data diolah dari laporan perbankan syariah tahun 2005 – Juni 2010

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, terlihat bahwa dana pihak ketiga yang terdiri dari giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah hingga triwulan ketiga tahun 2010 hanya sebesar 63,9 triliun rupiah. Namun hasil tersebut tetaplah dicapai dengan signifikan sejak triwulan ke empat tahun 2008 yang berarti telah mengalami kenaikan sekitar tiga puluh satu triliun rupiah. Sedangkan pada periode

³⁸ Bank Indonesia (2010). Outlook Perbankan Syariah. Hal 46

triwulan ke empat tahun 2005 hingga tahun 2007 tidaklah demikian, karena pergerakannya hanya naik sekitar empat belas triliun rupiah.

Secara spesifik, pergerakan dana pihak ketiga (DPK) terlihat melalui pertumbuhannya pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8
Pertumbuhan Triwulanan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Triwulan IV Tahun 2005 – Triwulan III 2010

Periode	Dana Pihak Ketiga (Milliar Rupiah)	Pertumbuhan Triwulanan (%)	Pertumbuhan Tahunan (%)
Trwln IV 2005	15.582,32	16,6	31,36
Trwln I 2006	14,955.70	-4,0	22,00
Trwln II	16.432,73	9,9	23,02
Trwln III	17.975,51	9,4	34,57
Trwln IV	20.672,18	15,0	32,66
Trwln I 2007	21.882,93	5,9	46,31
Trwln II	22.714,26	3,8	38,23
Trwln III	24.680,42	8,7	37,35
Trwln IV	28.011,67	13,5	35,50
Trwln I 2008	29.552,00	5,5	35,04
Trwln II	33.048,00	11,88	45,49
Trwln III	33.568,00	1,8	36,01
Trwln IV	36.852,00	9,8	31,56
Trwln I 2009	38.040,00	3,2	28,72
Trwln II	42.103,00	10,7	27,40
Trwln III	45.381,00	7,8	35,19
Trwln IV	52.271,00	15,2	41,84
Trwln I 2010	52.811,00	1,03	38,83
Trwln II	58.079,00	9,9	37,95
Trwln III	63.912,00	10,0	40,80

Sumber : Data diolah dari laporan perbankan syariah tahun 2005 – Juni 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga terus mengalami pertumbuhan triwulanan yang berfluktuatif, dengan tingkat tertinggi sebesar 15,8 persen. Kondisi ini juga berlaku sama dalam pertumbuhan tahunannya dengan tingkat

terendah sebesar 22 persen dan yang tertinggi sebesar 46, 31 persen pada triwulan pertama tahun 2007.

Kemudian, di triwulan pertama tahun 2006 pertumbuhan DPK adalah -4,02 yang memperlihatkan situasi yang berbeda dari triwulan ke empat tahun 2005 yang pertumbuhannya dapat sebesar 16,65 persen. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa telah terjadi kondisi serius yaitu pengalihan dana yang cukup besar oleh deposan keluar dari perbankan syariah. Namun, kondisi yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2006 tersebut memang tidak berlanjut hingga triwulan ketiga tahun 2010 yang kemudian DPK terus tumbuh di atas tiga persen dan berfluktuatif.

Selanjutnya, berdasarkan komposisinya maka dana pihak ketiga perbankan syariah selalu saja didominasi oleh deposito mudharabah yang dapat dilihat pada tabel 4.9. Sedangkan posisi setelah dominasi deposito tersebut adalah tabungan mudharabah, yang kemudian disusul oleh giro wadiah.

Tabel 4.9
Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)
Triwulan IV 2005 – Triwulan III 2010

Milliar Rupiah

	Trwln IV 2005	Trwln IV 2006	Trwln IV 2007	Trwln IV 2008	Trwln IV 2009	Trwln I 2010	Trwln II 2010	Trwln III 2010
Giro Wadiah	2.048	3.416	3.750	4.238	6.202	5.881	10.038	7.407
Tabungan (akad wadiah+mudharabah)	4.367	6.430	9.454	12.471	16.475	16.688	18.351	19.461
Deposito Mudharabah	9.169	10.826	14.807	20.143	29.595	30.243	29.689	37.044

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bulan Juni 2010

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank, sehingga deposito mudharabah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Selaku *mudharib*, bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku³⁹. Secara spesifik, tabel 4.10 memperlihatkan nilai deposito mudharabah, beserta tingkat bagi hasil rata - ratanya.

Tabel 4.10
Perkembangan Deposito Mudharabah Beserta Tingkat Bagi Hasilnya
Triwulan IV 2005 – Triwulan III 2010

	T4 2005	T4 2006	T4 2007	T4 2008	T4 2009	T1 2010	T2 2010	T3 2010
Deposito Mudharabah (Milliar Rp)	9.166	10.656	14.807	20.143	29.595	30.243	29.689	37.044
Tingkat Bagi Hasil Rata – Rata DPK atas Deposito Mudharabah dalam Rupiah (%)	8,66	9,75	7,97	8,61	7,48	7,22	6,86	6,85

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Bulan Juni 2010

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia hingga triwulan ketiga tahun 2010 terus berfluktuatif. Namun, satu hal yang jelas terlihat akibat buruk dari penurunan tingkat bagi hasil tersebut adalah turunnya nilai deposito mudharabah seperti pada triwulan kedua tahun 2010 walaupun pada kondisi sebelumnya yaitu di triwulan pertama hal yang sama tidak dapat mempengaruhi turunnya nilai deposito.

Dominasi deposito mudharabah dibandingkan tabungan mudharabah yang bentuknya *mutlhaqah* atau simpanan investasi tetapi bank diberikan hak tidak terbatas untuk mengelola dana depositan tersebut dan giro wadiah yang merupakan titipan dana dari depositan memang sangat dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi. Kondisi ini dapat dilihat bahwa tingkat bagi hasil untuk tabungan hanyalah dua hingga empat persen dan giro wadiah juga hanya sebesar satu hingga satu

³⁹ Bank Indonesia (2007). Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Hal 10

setengah persen sejak tahun 2005, sedangkan untuk deposito mudharabah adalah di atas enam persen seperti yang terlihat pada tabel 4.10 . Kondisi ini lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.11, yang memaparkan tingkat bagi hasil rata – rata DPK atas giro wadiah dan tabungan mudharabah dalam bentuk rupiah.

Tabel 4.11
Tingkat Bagi Hasil Rata – Rata DPK atas Tabungan Mudharabah dan Giro Wadiah
Triwulan IV 2005 – Triwulan I 2010

	T4 2005	T4 2006	T4 2007	T4 2008	T4 2009	T2 2010	T3 2010
Tingkat Bagi Hasil Rata – Rata DPK atas Giro Wadiah Rupiah (%)	1,13	1,28	1,07	1,21	1,04	1,27	0,99
Tingkat Bagi Hasil Rata – Rata DPK atas tabungan mudharabah Rupiah (%)	3,96	3,72	3,32	3,61	2,76	2,66	2,95

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Bulan Juni 2010

Berdasarkan tabel di atas, memang terlihat bahwa perkembangan dana pihak ketiga dari triwulan ke empat tahun 2005 hingga triwulan ketiga tahun 2010 yang didominasi oleh deposito mudharabah akibat produk giro dan tabungan tidaklah memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Dengan demikian, terlepas dari kebijakan bank syariah dalam penempatan dana deposito yang sifatnya tidak terikat yang kemudian dialihkan kepada pembiayaan produktif jangka pendek seperti modal kerja sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir resiko gagalnya bank untuk memberikan tingkat bagi hasil kepada deposan, maka tetap dapat dilihat bahwa pembiayaan investasi bank syariah secara prinsipnya memiliki peluang untuk dapat terus ditingkatkan sesuai kapasitasnya yang berkaitan erat dengan nilai deposito mudharabah tersebut.

4.3 Perkembangan Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi perbankan syariah seperti sejak tahun 2006 jika dilihat perjalanannya memang telah berjalan ditengah iklim investasi yang buruk. Padahal

sejak tahun 2003, pemerintah telah menetapkan sebagai tahun investasi dengan berbagai permasalahannya.

Iklm investasi yang menjadi pusat perhatian pemerintah adalah seperti regulasi ketenagakerjaan yang kurang kondusif, kebijakan investasi dan sektoral yang tumpang tindih baik antardaerah maupun antara pusat dan daerah yang terutama terkait dengan penerapan otonomi daerah, kurangnya insentif bagi investor (termasuk insentif perpajakan), kondisi keamanan yang belum kondusif di beberapa daerah tertentu, ekonomi biaya tinggi, dan prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit yang kemudian diperburuk oleh minimnya pengembangan infrastruktur akibat keterbatasan dana pemerintah⁴⁰. Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat secara spesifik iklim investasi di Indonesia seperti pada saat tahun 2006 dan 2007 yang memiliki peringkat cukup buruk dan jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya.

Tabel 4.12
Peringkat Indonesia berdasarkan Iklim Melakukan Investasi
Tahun 2006 dan 2007

Negara	Kemudahan Melakukan Bisnis		Memulai Bisnis		Perizinan		Ketenagakerjaan		Perlindungan Investor		Kepatuhan Kontrak		Menutup Bisnis	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Indonesia	133	123	163	168	117	99	154	153	49	51	142	141	137	136
Malaysia	21	24	74	74	102	105	43	43	4	4	14	63	53	54
Vietnam	94	91	90	97	62	63	82	84	175	165	41	40	119	121
Thailand	17	15	27	36	11	12	49	49	32	33	26	26	41	44
China	92	83	128	135	175	175	86	86	81	83	20	20	76	57
Philipina	130	133	135	144	75	77	122	122	141	141	113	113	147	147
Singapura	1	1	11	9	5	5	1	1	1	2	5	4	0,8	2

Sumber : Bank Indonesia (2008). LPI 2007. Hal 31

Kondisi yang memperlihatkan secara jelas iklim investasi di Indonesia yang tidak kondusif yaitu berupa memulai bisnis, ketenagakerjaan, kepatuhan kontrak, dan menutup bisnis, yang sangat berbeda jauh dengan dengan negara Singapura. Kemudian, jika dilihat dari sisi perlindungan investor, maka Indonesia memang berada diperingkat ke 51 yang lebih tinggi dari Vietnam, Philipina, dan Cina. Namun untuk

⁴⁰ Bank Indonesia (2004). LPI 2003. Hal. 16

ketenagakerjaan, maka Indonesia tetaplah berada pada peringkat yang paling bawah dibandingkan dengan negara lainnya.

Beberapa kondisi umum dari iklim investasi inilah yang memperlihatkan bahwa situasi investasi di Indonesia memang dapat berlaku cukup buruk di tengah ketersediaan fasilitas pembiayaan investasi sektor perbankan. Khusus untuk perbankan syariah, situasi yang telah terjadi tersebut juga memang dapat berkemungkinan memperberat kinerja pembiayaan investasi. Padahal, pembiayaan investasi perbankan syariah berjalan di tengah dominasi kredit investasi dan juga kemungkinan terus terjadinya pembiayaan investasi bermasalah.

Permasalahan seperti pembiayaan investasi bermasalah dan juga kompetisi atas kredit investasi yang melibatkan pergerakan tingkat margin yang kompetitif teruslah terjadi pada saat bank umum dan unit usaha syariah secara kelembagaan telah banyak mengalami perubahan dan berarti peranannya yang semakin besar dalam realisasi pembiayaan investasi dapat diwujudkan.

Tabel 4.13
 Jaringan Kantor Perbankan Syariah
 Triwulan IV 2005 – Triwulan III 2010

	T4 2005	T4 2006	T4 2007	T4 2008	2009		2010		
					T3	T4	T1	T2	T3
Bank Umum Syariah									
Jumlah Bank	3	3	3	5	5	6	8	10	10
Jumlah Kantor	304	349	401	581	660	711	934	1.058	1.151
Unit Usaha Syariah									
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	19	20	26	27	24	25	25	23	23
Jumlah Kantor	154	183	196	241	264	288	299	244	237

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bulan Juni 2010. Hal. 1

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa adanya dominasi bank umum syariah yang memperluas jaringan kantornya beserta kehadiran tujuh bank umumnya sejak

tahun 2008. Dengan demikian, perkembangan bank umum secara nasional ini tentunya dapat memberikan peningkatan pembiayaan investasi kepada dunia usaha dengan berbagai produknya yang meliputi akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

Secara spesifik, pada tabel 4.14 dapat dilihat lebih lanjut jaringan kantor di sepuluh bank umum dan di tiga puluh tiga bank unit usaha yang meliputi kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas yang ada di daerah hingga triwulan ketiga tahun 2010.

Bank umum syariah berdasarkan kantor cabang pembantunya didominasi oleh Bank Syariah Mega Indonesia dengan jumlah sebesar 329 kantor yang tersebar secara nasional dan kemudian barulah Bank Syariah Mandiri dengan 167 kantor cabangnya, dan yang terkecil adalah Bank Victoria Syariah. Sedangkan di unit usaha syariah, yang mendominasi adalah BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) dengan 21 kantornya dan yang terkecil adalah BPD Sulawsi Utara dan BPD Sumatera Utara.

Secara total, bank umum syariah memiliki 651 kantor cabang pembantu (KCP) atau unit pelayanan syariah dan bank unit usaha syariah berjumlah 67 KCP yang tersebar secara nasional. KCP terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mega Indonesia dengan jumlah 329 unit, sedangkan bank syariah terbesar lainnya yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank Syariah Muamalat Indonesia masing - masing hanya memiliki 167 dan 49 unit kantor cabang pembantu (KCP). Jadi, melalui perkembangan kantor unit pelayanan syariah inilah dunia usaha yang tersebar di berbagai daerah dalam wilayah kabupaten dapat lebih tersentuh pembiayaan investasi melalui berbagai akad yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

Tabel 4.14
Jaringan Kantor Individual Bank Umum dan Unit Usaha Syariah
Triwulan III 2010

No.	Kelompok Bank	KP/US	KPO/KC	KCP/UPS	KK
Bank Umum Syariah		10	293	651	197
1.	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	1	75	49	102
2.	PT Bank Syariah Mandiri	1	94	167	85
3.	PT Bank Syariah Mega Indonesia	1	34	329	5
4.	PT Bank Syariah BRI	1	34	40	2
5.	PT Bank Syariah Bukopin	1	8	5	-
6.	PT Bank Panin Syariah	1	4	-	-
7.	PT Bank Victoria Syariah	1	6	2	-
8.	PT BCA Syariah	1	5	3	3
9.	PT Bank Jabar dan Banten	1	6	28	-
10.	PT Bank Syariah BNI	1	27	28	-
Unit Usaha Syariah		23	102	67	45
11.	PT Bank Danamon	1	8	3	-
12.	PT Bank Permata	1	10	12	-
13.	PT Bank Internasional Indonesia (BII)	1	5	-	-
14.	PT Bank CIMB Niaga	1	21	5	-
15.	HSBC,Ltd.	1	5	-	-
16.	PT Bank DKI	1	2	-	-
17.	BPD DIY	1	1	-	-
18.	BPD Jawa Tengah	1	2	-	1
19.	BPD Jawa Timur	1	1	-	37
20.	BPD Banda Aceh	1	2	9	-
21.	BPD Sumatera Utara	1	3	1	-
22.	BPD Sumatera Barat	1	2	2	1
23.	BPD Riau	1	2	3	1
24.	BPD Sumatera Selatan	1	3	-	2
25.	BPD Kalimantan Selatan	1	2	-	-
26.	BPD Kalimantan Barat	1	1	-	-
27.	BPD Kalimantan Timur	1	2	7	2
28.	BPD Sulawesi Selatan	1	3	1	-
29.	BPD Nusa Tenggara Barat	1	1	-	-
30.	PT BTN	1	20	3	-
31.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	1	2	21	-
32.	PT OCBC NISP	1	3	-	-
33.	PT Bank Sinarmas	1	1	-	1

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bulan Juni 2010. Hal.2

Berdasarkan tabel 4.14, dapat dilihat lebih lanjut bahwa jumlah kantor bank umum syariah di Indonesia terdiri dari sepuluh kantor pusat (KP), 293 kantor pusat operasional (KPO), dan 197 kantor kas (KK). Sedangkan untuk bank unit usaha syariah adalah 23 kantor pusat, 102 kantor pusat operasional, dan 45 kantor kas.

Kemudian, pada tabel berikut ini dapat dilihat pembiayaan investasi yang disalurkan bank umum dan unit usaha syariah di 31 propinsi pada triwulan kedua dan triwulan ketiga tahun 2010 secara keseluruhan hanya untuk sektor pertambangan, yang untuk propinsi Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara belum adanya realisasi pembiayaan investasi.

Tabel 4.15
Pembiayaan Investasi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Propinsi
Triwulan III dan Triwulan IV 2010

Milliar Rupiah

Propinsi	Pembiayaan Investasi di Sektor Pertambangan di triwulan ketiga 2010	Pembiayaan Investasi di Sektor pertambangan di triwulan ke empat 2010
DI Aceh	89	94
Sumater Utara	888	913
Sumatera Barat	121	124
Sumatera Selatan	239	227
Bangka Belitung	27	29
Jambi	79	86
Bengkulu	18	17
Riau	359	364
Kepulauan Riau	112	128
Lampung	76	99
DKI Jakarta	5.833	6.350
Jawa Barat	765	834
Banten	228	234
Jawa Tengah	390	431
DI Yogyakarta	110	114
Jawa Timur	618	646
Bali	16	15
Kalimantan Barat	189	195
Kalimantan Tengah	31	33
Kalimantan Timur	408	470
Kalimantan Selatan	307	364
Sulawesi Utara	3	4
Gorontalo	15	24
Sulawesi Barat	3	4
Sulawesi Tengah	21	18
Sulawesi Tenggara	0	0
Sulawesi Selatan	115	118
Maluku	0	0
Maluku Utara	0	0
NTB	83	91
NTT	17	22
Irian jaya Barat	0	1
Papu	68	72
Luar Indonesia	3	1

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bulan Juni dan September 2010

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan investasi seperti untuk sektor pertambangan pada triwulan kedua tahun 2010 yang terbesar secara nasional ada di propinsi DKI Jakarta, yang kemudian disusul oleh propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan hingga yang terkecil yaitu di propinsi Sulawesi Utara dan Barat. Kemudian, untuk di luar Indonesia pembiayaan investasi perbankan syariah hanya memiliki nilai sebesar tiga miliar rupiah. Sedangkan untuk triwulan ketiga tahun 2010, kondisinya juga tidak berbeda pada triwulan keduanya yang terlihat dari nilai investasi yang terbesar masih terkonsentrasi di propinsi DKI Jakarta, kemudian di Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Nilai pembiayaan investasi di propinsi DKI Jakarta mencapai 6,35 triliun rupiah sedangkan di propinsi Sumatera Utara nilainya mencapai 0,91 triliun rupiah dan di propinsi Jawa Barat sebesar 0,83 triliun rupiah.

Kemudian, beranjak dari sektor yang dibiayai perbankan syariah, pertumbuhan pembiayaan investasi sejak tahun 2006 hingga triwulan ketiga tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.16. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pembiayaan investasi triwulanan tertinggi di sepanjang tahun 2006 hingga 2010 hanyalah pada saat triwulan kedua tahun 2008 sebesar 18,06 persen. Kondisi tersebut terjadi setelah pertumbuhan yang minus dari triwulan ketiga 2006 hingga triwulan pertama tahun 2007 yang kemudian pada triwulan kedua tahun 2007 pertumbuhan pembiayaan dapat mencapai 15,83 persen dan di setiap tahunnya pertumbuhan yang baik terjadi di setiap triwulan kedua dan ketiga.

Setelah pertumbuhan pembiayaan yang minus pada triwulan ketiga tahun 2006 hingga triwulan pertama tahun 2007, ada sebuah kondisi yang tentunya mengembirakan bahwa bank umum dan unit usaha syariah lebih serius mengedepankan pembiayaan investasi yang terlihat dari pertumbuhan pada triwulan

kedua tahun 2007 sebesar 15,83 persen dan 10,41 persen pada triwulan ketiga. Kondisi inilah yang terus berlanjut pada triwulan kedua tahun 2008 dengan pertumbuhannya sebesar 18,06 persen dan 11,04 pada triwulan ketiganya. Kemudian, hingga di triwulan kedua dan ketiga tahun 2009 hal yang sama juga demikian berlakunya. Namun, khusus untuk di tahun 2010, pada triwulan keduanya pertumbuhan pembiayaan investasi sebesar 3,87 persen yang lebih rendah dibandingkan pada triwulan ketiganya yang dapat mencapai 7,9 persen.

Tabel 4.16
Perkembangan Pembiayaan Investasi
Triwulan I 2006 – Triwulan III 2010

Periode	Pembiayaan Investasi (Milliar Rupiah)	Pertumbuhan Pembiayaan Investasi (%)
T4 2005	4.287,19	5,25
T1 2006	4.561,47	6,40
T2	4.875,94	6,70
T3	4.530,57	-7,08
T4	4.373,73	-3,46
T1 2007	4.230,00	-3,29
T2	4.900,00	15,83
T3	5.410,00	10,41
T4	5.640,00	4,25
T1 2008	5.870,00	4,08
T2	6.930,00	18,06
T3	7.695,00	11,04
T4	7.907,00	2,76
T1 2009	8.229,00	4,07
T2	8.696,00	7,75
T3	9.371,00	7,78
T4	9.955,00	6,23
T1 2010	10.814,00	8,63
T2	11.233,00	3,87
T3	12.120,00	7,90

Sumber : Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2005 – September 2010

Selanjutnya, pertumbuhan pembiayaan investasi yang diduga berkaitan erat dengan tingkat margin dan pembiayaan bermasalah investasi memang dapat berlaku demikian, yang pada tabel 4.17 berikut ini dapat dilihat secara statistik kondisi umumnya.

Tabel 4.17
Tingkat Margin Pembiayaan Investasi dan Rasio Pembiayaan Investasi bermasalah
Triwulan IV 2005 – Triwulan III 2010

Periode	Tingkat Margin (%)	Perubahan Tingkat Margin (%)	Rasio Pembiayaan Investasi Bermasalah (%)	Perubahan NPF investasi (%)
T4 2005	12,51	-	3,45	-
T4 2006	13,34	0,21	5,90	0,81
T4 2007	13,87	0,14	5,78	0,07
T1 2008	13,33	- 0,54	6,08	0,30
T2	13,38	0,05	6,40	0,32
T3	13,43	0,05	6,64	0,24
T4	13,67	0,24	6,18	-0,46
T1 2009	12,39	-0,38	7,08	0,90
T2	13,35	-0,04	5,92	-2,16
T3	13,37	0,02	7,79	1,77
T4	13,75	0,38	5,36	-2,43
T1 2010	13,82	0,07	5,84	0,48
T2	13,82	0	5,45	-0,39
T3	13,45	-0,37	6,44	0,99

Sumber : Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2005 – September 2010

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat dilihat pergerakan tingkat margin triwulanan seperti di sepanjang tahun 2008 berkisar antara - 0,54 hingga 0,24 persen. Namun, selama triwulan kedua dan ketiga di tahun 2008 tersebut, perbankan syariah hanya menaikkan tingkat margin sebesar 0,05 persen dan hingga pada situasi terakhir yaitu di triwulan ke empatnya barulah terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,24 persen. Kondisi ini juga berlaku pada triwulan ke empat tahun 2009 yang perubahan tingkat margin hingga 0,38 persen dibandingkan pada triwulan ketiganya.

Tingkat margin yang berlaku tetaplh seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa dunia usaha yang sifatnya mengambang (floating) terpengaruh oleh tingkat margin tersebut yang apabila semakin tinggi ratenya maka pada akhirnya akan memperkecil besaran pembiayaan investasi. Berdasarkan pada tabel 4.17 juga dapat dilihat kondisi tersebut telah terjadi dengan membandingkan periode triwulan pertama tahun 2010 yang tingkat marginnya hanya 0,07 persen dengan di triwulan selanjutnya yang tidak

mengalami kenaikan, serta pada triwulan ketiganya bahkan terjadi penurunan tingkat margin sebesar 0,37 persen sehingga tingkat margin menjadi 13,45 persen.

Kemudian, pembiayaan investasi bermasalah melalui rasionya yang terlihat pada tabel (4.17) di triwulan ketiga tahun 2009 sebesar 7,79 memang menggambarkan bahwa pembiayaan investasi bermasalah tersebut memang telah berpengaruh kepada realisasi pembiayaan investasi seperti untuk periode triwulan ke empat yang mengalami penurunan menjadi 6,23 persen seperti yang terlihat pada tabel (4.16) dibandingkan triwulan sebelumnya yang dapat mencapai 7,78 persen dengan angka NPF sebesar 5,92 persen di triwulan kedua tahun 2009. Kondisi tersebut selanjutnya juga dapat dilihat yaitu di saat NPF investasi di triwulan ke empat tahun 2009 turun menjadi sebesar 5,36 maka pada triwulan pertama tahun 2010 pertumbuhan pembiayaan investasi di tabel (4.16) adalah sebesar 8,63 persen.

4.4 Perkembangan Inflasi

Inflasi yang dimaksudkan di dalam studi adalah pergerakan indeks harga konsumen (IHK) secara triwulanan yang kemudian diduga dapat berpengaruh negatif atas pembiayaan investasi karena posisinya sebagai ekspektasi dari keuntungan bank syariah dan dunia usaha. Melalui data statistik IHK bulanan bertahun dasar 2000 yang diolah maka dapat dilihat inflasi triwulan pada tabel 4.18 angkanya secara umum masih di bawah 5 persen.

Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa inflasi memang tidak akan menjadi permasalahan yang cukup serius untuk pembiayaan investasi, yang juga apabila terjadi kenaikan inflasi di Indonesia yang pada umumnya akibat desakan biaya maka sesuai sifatnya hanyalah sementara (temporer) seperti triwulan ke empat tahun 2005 sebesar 10,08 persen dan pada triwulan pertama dan kedua tahun 2008 akibat kenaikan harga energi (BBM).

Namun, meskipun berdasarkan data statistik berlaku demikian maka kondisi inflasi tetaplah dimungkinkan menjadi prioritas utama perbankan syariah yang secara luas dapat dipahami bahwa inflasi adalah indikator perekonomian dan perbankan tetap memiliki kemampuan untuk mengekspektasi dan mengcover segala bentuk resiko yang akan dihadapi seperti akibat inflasi yang selanjutnya menjadi pertimbangan di dalam penyaluran pembiayaan investasinya sesuai konsep investasi Islam yang berkaitan erat dengan ekspektasi dari return yang diharapkan. Secara spesifik, gambaran inflasi yang telah diuraikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini mengenai pergerakan triwulanannya dari triwulan ke empat tahun 2005 hingga triwulan ketiga 2010.

Tabel 4.18
Inflasi Atas Dasar Indeks Harga Konsumen (2002 = 100)
Triwulan I 2006 – Triwulan III 2010

Periode	Inflasi Triwulanan	Perubahan Inflasi (%)
T4 2005	10,08	-
T1 2006	1,98	-8,1
T2	0,87	-1,11
T3	1,16	0,29
T4	2,44	1,28
T1 2007	1,91	-0,53
T2	0,17	-1,74
T3	2,28	2,11
T4	2,09	-0,19
T1 2008	3,42	1,33
T2	2,46	1,08
T3	2,88	-1,62
T4	0,53	-2,35
T1 2009	0,36	-0,17
T2	-0,16	-0,52
T3	2,07	2,23
T4	0,49	-1,58
T1 2010	1,00	0,51
T2	1,42	0,42
T3	3,16	1,74

Sumber : diolah, dari Laporan Inflasi Bulanan BPS Tahun 2005 – September 2010

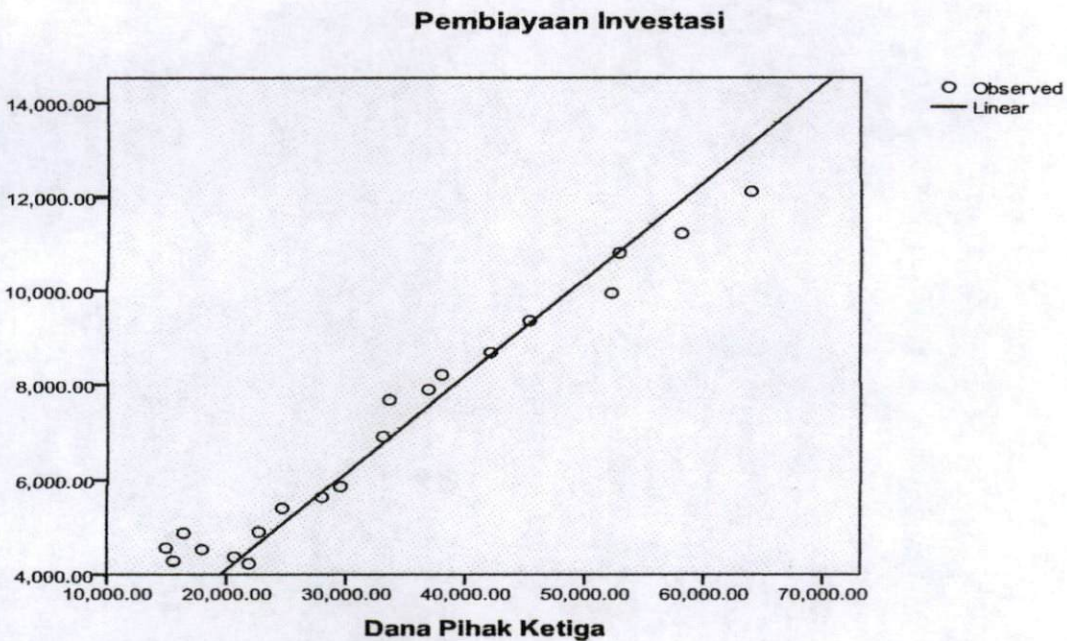
BAB V

PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

Pemilihan model regresi berganda dengan melihat pola data yaitu melalui *scatter plot* di bawah ini dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sulit dilaksanakan, yang dikarenakan hanya hubungan antara pembiayaan investasi dengan dana pihak ketiga yang jelas yaitu linear, sedangkan untuk tingkat margin pembiayaan investasi, pembiayaan investasi bermasalah, dan inflasi memperlihatkan ketidakjelasan hubungan.

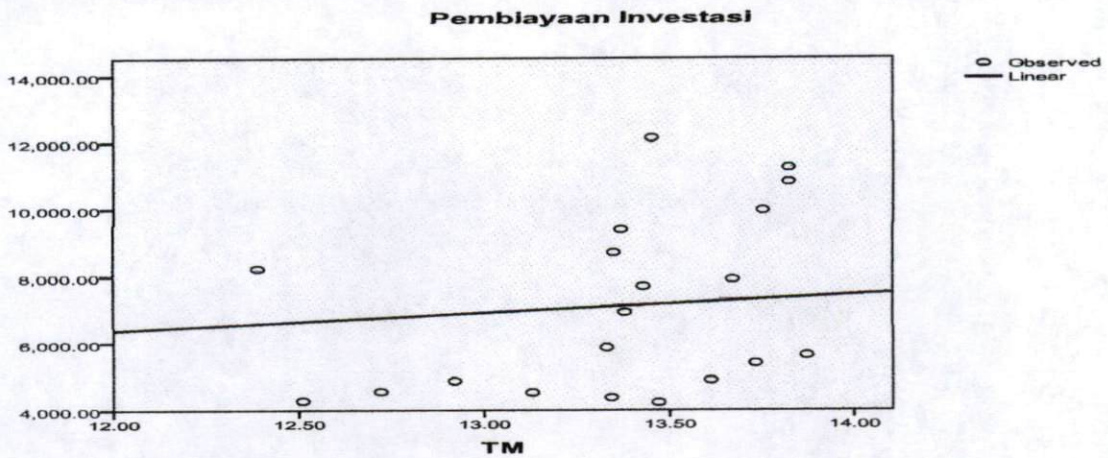
Gambar 5.1
Sebaran Data Pembiayaan Investasi dengan Dana Pihak Ketiga



Sumber : data diolah, melalui SPSS

Gambar 5.1 memperlihatkan bahwa sebaran data pembiayaan investasi dengan dana pihak ketiga secara jelas adalah linear dan berhubungan positif, yaitu apabila DPK naik, maka pembiayaan investasi akan naik.

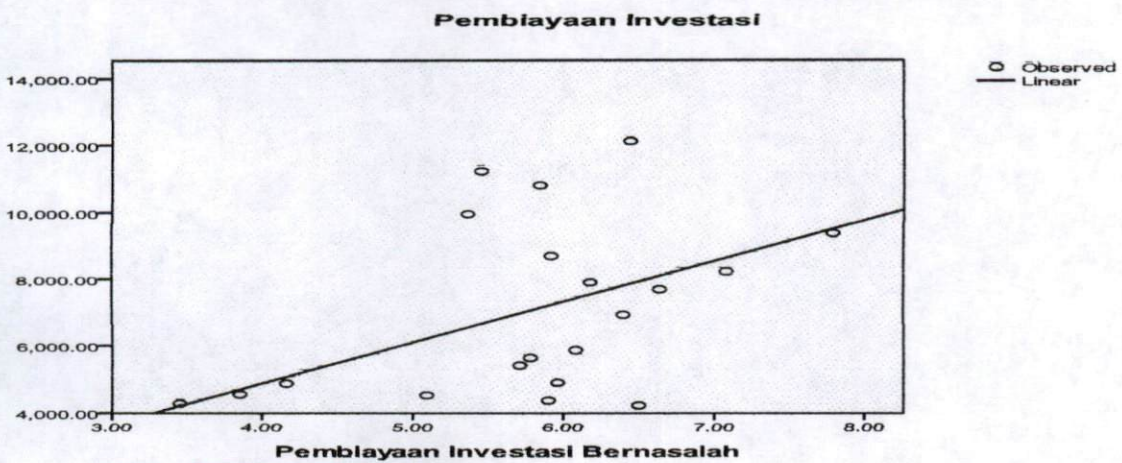
Gambar 5.2
Sebaran Data Pembiayaan Investasi dengan Tingkat Margin Pembiayaan Investasi



Sumber : data diolah, melalui SPSS

Gambar 5.2 memperlihatkan kondisi yang berbeda dari pola linear gambar 5.1, yang sulit dikatakan ada hubungan linear antara tingkat margin dengan pembiayaan investasi. Hal ini dikarenakan ada kecenderungan di saat tingkat margin mengalami kenaikan maka pembiayaan investasi turun, namun di sisi yang lain yaitu pada saat tingkat margin mengalami kenaikan maka pembiayaan investasi juga dapat mengalami kenaikan.

Gambar 5.3
Sebaran Data Pembiayaan Investasi dengan Pembiayaan Investasi Bermasalah

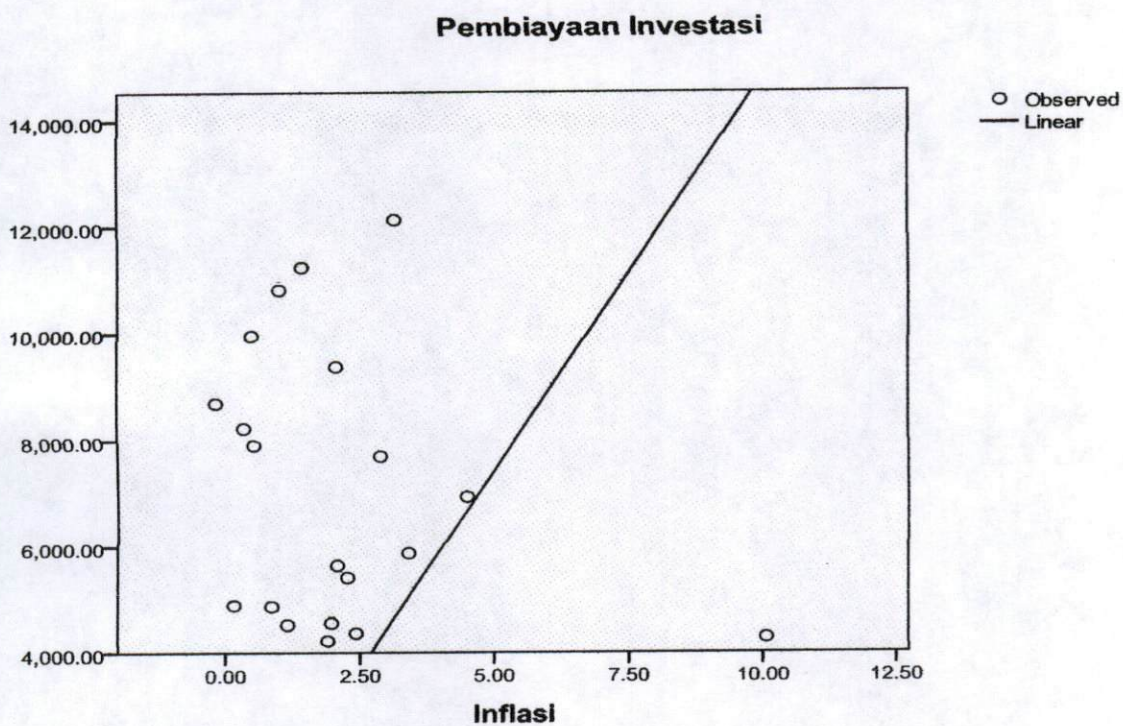


Sumber : data diolah, melalui SPSS

Berdasarkan gambar 5.3, juga terlihat ketidakjelasan hubungan yang linear antara pembiayaan investasi bermasalah dengan pembiayaan investasi. Hal ini

dikarenakan ada kecenderungan linear yaitu pada saat pembiayaan investasi bermasalah mengalami kenaikan maka pembiayaan investasi juga naik, namun di sisi yang lain yaitu pada saat pembiayaan investasi mengalami kenaikan maka pembiayaan investasi juga dapat mengalami penurunan.

Gambar 5.4
Sebaran Data Pembiayaan Investasi dengan Inflasi



Sumber : data diolah, melalui SPSS

Kemudian dari gambar 5.4, ketidakjelasan hubungan linear juga berlaku antara inflasi dengan pembiayaan investasi. Hal ini dikarenakan ada kecenderungan linear yaitu pada saat inflasi naik maka pembiayaan investasi turun, namun di sisi yang lain yaitu pada saat inflasi mengalami kenaikan maka pembiayaan investasi juga dapat mengalami kenaikan.

Dengan demikian, pemilihan model regresi adalah sesuai yang telah dikemukakan pada metodologi penelitian, yaitu menggunakan model regresi linear berganda (3.3).

5.1.1 Hasil Regresi

Analisis hubungan dana pihak ketiga (DPK), tingkat margin pembiayaan investasi (TM), pembiayaan investasi bermasalah (NPFi), dan inflasi (P) terhadap pembiayaan investasi dilakukan melalui regresi linear berganda.

Model regresi linear berganda tersebut adalah :

$$PI_t = \beta_0 + \beta_1 DPK_t + \beta_2 TM_t + \beta_3 NPFi_t + \beta_4 P_t + \mu_{it}$$

Parameter (β_1 hingga β_4) pada model di atas tetaplah ditaksir menggunakan metode untuk mengestimasi parameter regresi sederhana, yaitu OLS (*ordinary least square*), yang berdasarkan pengolahan data melalui SPSS dapat dilihat sebagai berikut hasil estimasi regresinya secara keseluruhan.

Tabel 5.1
Hasil Estimasi Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	d Coefficients Beta			Zero-order	Partia I	Part	Toleranc e	VIF
1 (Constant)	10278.472	3281.519		3.132	.007					
Dana Pihak Ketiga (DPK)	.181	.007	1.047	24.539	.000	.985	.988	.860	.676	1.480
Tingkat Margin Pembiayaan Investasi (TM)	-625.919	249.573	-.103	-2.508	.024	.371	-.544	-.088	.722	1.385
Pembiayaan Investasi Bermasalah (NPFi)	-137.591	104.260	-.055	-1.320	.207	.424	-.323	-.046	.696	1.438
Inflasi atas dasar IHK (P)	-51.803	47.902	-.043	-1.081	.297	-.281	-.269	-.038	.777	1.286

Dependent Variable: Pembiayaan Investasi (PI)

Sumber : Berdasarkan Hasil Estimasi melalui SPSS

Berdasarkan hasil estimasi, juga diperoleh R^2 sebesar 0,982 yang berarti variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan investasi sebesar 98,2 persen dan model regresi dapat dikatakan cukup baik. Namun, sebelum pengujian hipotesis maka dilakukanlah estimasi atas model regresi melalui pengujian asumsi klasik sesuai ketentuan permodelan ekonometrik.

5.1.1.1 Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk melihat bahwa model telah terspesifikasi dengan benar sesuai ketentuan permodelan ekonometrik sehingga interpretasi hasil regresi dari model dapat menjawab ataupun menguji hipotesis yang menjadi substansi masalah. Adapun uji asumsi klasik yang dimaksud adalah uji autokorelasi, heterokedastis, multikolinearitas, dan normalitas.

5.1.1.1.1 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara variabel gangguan (error) dalam regresi karena adanya perilaku variabel ekonomi untuk data *time series* seringkali berhubungan (berkorelasi) antar waktu. Apabila suatu model regresi mengandung autokorelasi maka akan memberikan konsekuensi model regresi tersebut tidak mempunyai varian yang minimum. Varian yang tidak minimum tersebut akan mengakibatkan hasil regresi tidak baik dalam uji t (secara parsial atau individu) maupun uji f (secara menyeluruh atau simultan). Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka statistik DW (*Durbin Watson*) dari hasil estimasi dan membandingkannya dengan nilai d_l (batas bawah) dan d_u (batas atas) yang ada di tabel *Durbin Watson*⁴¹. Hasilnya adalah sebagai berikut :

⁴¹ Nachrowi dan Hardius (2005). *Op Cit.* Hal. 135 - 140

Tabel 5.2
Pendeteksian Autokorelasi

	Hasil	Keterangan
hasil perhitungan d dari uji Durbin Watson (d)	1,785	berdasarkan estimasi
N	20	banyaknya data analisa (observasi)
K (regressor)	4	variabel independen
nilai d_l dalam tabel	0,90	batas bawah
nilai d_u dalam tabel	1,83	Batas atas
kesimpulan	$d = 1,785$ $0,90 < 1,785 < 1,83$ Jadi, dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi	sesuai aturan uji <i>Durbin Watson</i> ⁴² , apabila $d_l < d < d_u$, maka tidak ada keputusan yang dapat diambil tentang adanya autokorelasi

Sumber : Data diolah dan Hasil Estimasi melalui SPSS

5.1.1.1.2 Heterokedastisitas

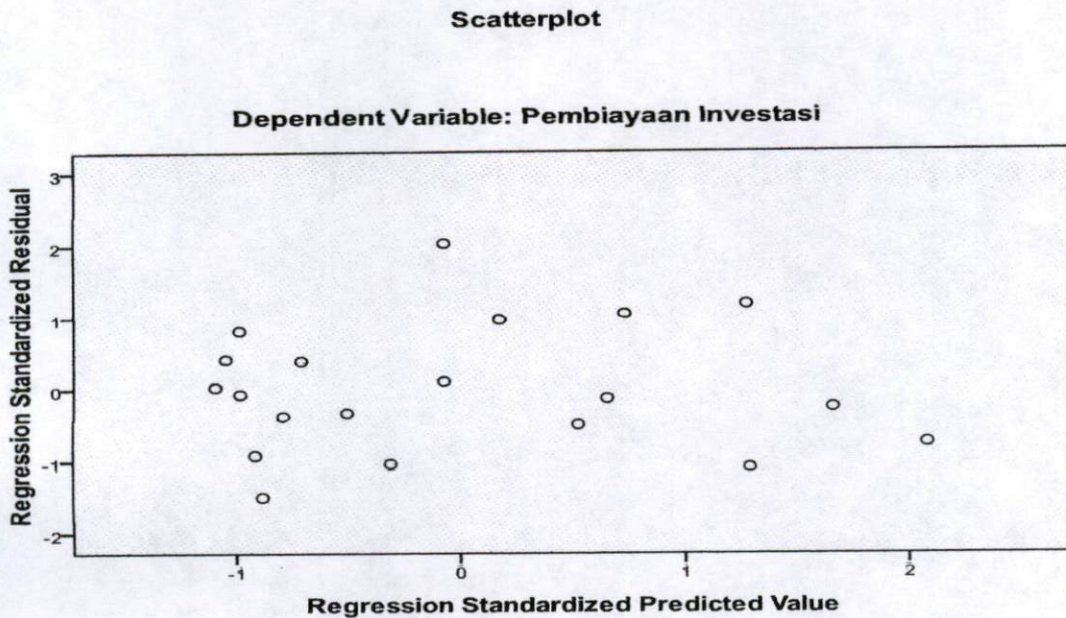
Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola sisaan dalam grafik yang dibuat dengan memplotkan sisaan (e_i^2 atau e_i / s_e) dengan nilai X atau dugaan Y dan grafik yang memperlihatkan tidak terjadinya heterokedastisitas adalah apabila sebaran titik sisaan tidak membentuk pola linear ataupun pola yang sistematis⁴³.

⁴² *Op.Cit* Hal. 359

⁴³ *Ibid.* Hal. 127 -1 31

Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah supaya model dapat dilihat bebas dari permasalahan heterokedastisitas yang merupakan kondisi tidak konstan variansi sehingga berdampak kepada kurang akuratnya pengujian hipotesis.

Gambar 5.5
Plot Pendektesian Heterokedastisitas



Sumber : Pengolahan Data melalui SPSS

Berdasarkan grafik di atas, *scatterplot* antara *standardized residual* (*ZRESID) atau residual dan *standardized predicted value* (*ZPRED) atau taksiran tidak membentuk suatu pola tertentu yang sistematis. Dengan kata lain dapat dikatakan residual variansi adalah konstan dan dapat disimpulkan bahwa terjadi homokedastisitas. Berdasarkan kondisi ini nantinya di dalam pengujian hipotesis yaitu uji t dan F akan akurat.

5.1.1.1.3 Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat model terbebas dari masalah kolinieritas (hubungan linear) di antara variabel – variabel regresornya, yang apabila terjadi maka koefisien determinasi (R^2) tinggi, tetapi tidak banyak variabel

yang signifikan dari uji t. Hal ini terjadi karena variabel bebas memiliki variansi yang besar dari taksiran OLS akibat kolinieritas di antara variabel – variabel regresornya.

Permasalahan umum multikolinieritas adalah yang bentuknya hampir sempurna atau persamaan regresi berganda dapat dibentuk, tetapi secara statistik mempunyai SE (*standard error*) yang besar yang berakibat kepada interval kepercayaan yang melebar sehingga β (koefisien taksiran variabel bebas) kurang tepat atau dapat dikatakan tidak signifikan⁴⁴. Terjadinya multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan nilai VIF (*variance inflation factor*). Apabila nilai VIF berkisar antara 1 – 4 dan nilai tolerance mendekati angka 1 maka yang terjadi adalah *low collinearity* sehingga model regresi dapat dianggap bebas dari masalah multikolinieritas atau tepatnya hanya *low collinearity*⁴⁵.

Tabel 5.3
Pendektesian Masalah Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Dana Pihak Ketiga (DPK)	0,676	1,480	VIF < 2 dan Tolerance mendekati 1 = low kolinieritas
Tingkat Margin Pembiayaan Investasi (TM)	0,722	1,385	VIF < 2 dan Tolerance mendekati 1 = low kolinieritas
Pembiayaan investasi Bermasalah (NPFi)	0,696	1,438	VIF < 2 dan Tolerance mendekati 1 = low kolinieritas
Inflasi (P)	0,777	1,286	VIF < 2 dan Tolerance mendekati 1 = low kolinieritas

Berdasarkan tabel pendektesian masalah multikolinieritas di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas yang serius atau hanya low kolinieritas. Hal ini sesuai kondisi umum pendektesian multikolinieritas berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang hasilnya masih dibawah 2 dan nilai

⁴⁴ Nachrowi dan Hardius (2005). *Op Cit.* Hal 120 – 122

⁴⁵ Stanislaus (2006). Hal 224

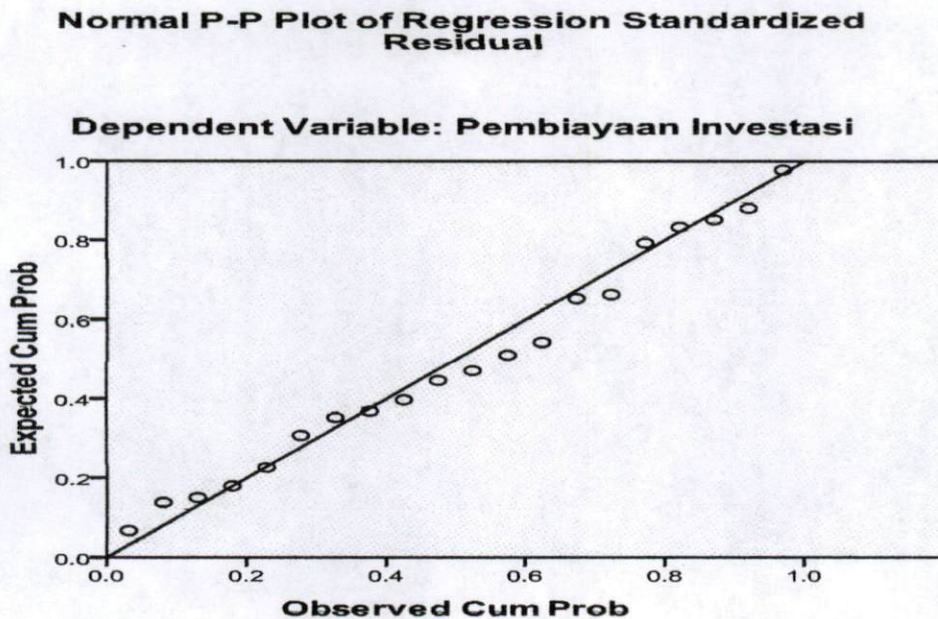
tolerance yang mendekati 1. Atas kondisi inilah maka selanjutnya dapat diartikan bahwa variabilitas variabel independen yang terpilih di dalam studi tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya dan taksiran koefisien di dalam model nantinya akan tepat dan dapat digunakan untuk intepretasi.

5.1.1.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Untuk pengujiannya dapat digunakan metode analisis grafik atau *normal probability plot* (normal P – P Plot).

Normal P – P Plot pada gambar 5.6 memperlihatkan bahwa model regresi telah memenuhi uji normalitas karena data tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak berpencar jauh dari garis lurus.

Gambar 5.6
Plot Pendektesian Normalitas Data



Sumber : Pengolahan Data melalui SPSS

5.1.1.2 Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Model

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda di dalam penelitian ini layak digunakan karena telah terbebas dari masalah multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Sehingga hasil uji estimasi yang telah dilakukan dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam model regresi *double log* tersebut.

Persamaan regresi berdasarkan hasil estimasi adalah sebagai berikut :

$$PI = 10278,47 + 0,181 DPK - 625.919 TM - 137.591 NPFi - 51.803 P$$

(24,539) (-2,508) (-1,320) (-1, 081)

$$R^2 = 0,982 \qquad F - \text{tabel} = 3,06$$

$$F\text{-test} = 199,592 \qquad t\text{-tabel} = 2,101$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,982 atau sebesar 98,2 persen. Angka ini memberikan arti bahwa nilai pembiayaan investasi perbankan syariah dijelaskan sebesar 98,2 persen secara bersama – sama oleh variabel dana pihak ketiga, tingkat margin pembiayaan investasi, pembiayaan investasi bermasalah, dan inflasi. Sedangkan sebesar 1,8 persen lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Kemudian untuk pengujian hipotesis, maka yang akan dilakukan adalah pengujian pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen (uji F) dan pengujian secara parsial (individu) setiap variabel independen terhadap variabel dependen (uji t) .

Berdasarkan uji F, diperoleh nilai F statistik sebesar 199,592 sedangkan nilai F tabel pada tingkat kepercayaan 95 % adalah 3,06. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa F test lebih besar daripada F tabel. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel

independen secara bersama – sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kemudian untuk menguji secara individual pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakanlah uji t.

Tabel 5.4
Uji t (Secara Parsial atau Individual)

variabel	t-statistik	Hasil
DPK	24,539	signifikan
TM	-2,508	signifikan
NPFi	-1,320	tidak signifikan
P	-1, 081	tidak signifikan

t-tabel sebesar 2,101

Sumber : Pengolahan Data melalui SPSS

Berdasarkan pengujian secara parsial (individual) maka diketahui bahwa kenaikan pembiayaan investasi triwulanan di perbankan syariah akan terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah dana pihak ketiga dan menurunnya tingkat margin pembiayaan investasi. Sedangkan pembiayaan investasi bermasalah dan Inflasi walaupun memiliki arah negatif atas pembiayaan investasi tetapi tetaplah dikatakan tidak berpengaruh. Jadi, hasil penemuan empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat margin pembiayaan investasi berpengaruh kepada pembiayaan investasi dapat diterima. Sedangkan untuk variabel pembiayaan investasi bermasalah dan inflasi tidaklah demikian karena melalui uji t (secara parsial) tidak ditemukan hubungannya yang signifikan atas pembiayaan investasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa :

- a. Peningkatan dana pihak ketiga (DPK) secara triwulanan dan dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*) maka pembiayaan investasi akan mengalami peningkatan.
- b. Peningkatan tingkat margin pembiayaan investasi (TM) secara triwulanan dan dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*) maka pembiayaan investasi akan mengalami penurunan.

Hasil studi yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan memiliki tingkat signifikan yang sangat erat atas pembiayaan investasi memang telah diduga pada awalnya demikian, karena DPK perbankan syariah yang terdiri dari produk dana simpanan (tabungan dan giro wadi'ah (titipan) dan produk dana investasi (deposito investasi mudharabah) akan digabung dengan pendekatan pool of fund yang kemudian dialokasikan ke pembiayaan investasi.

Secara spesifik, hal tersebut dapat dilihat dari konsep tabungan di dalam keseimbangan perekonomian nasional yang dikenal sebagai sumber investasi dan secara substansi tabungan tersebut dalam industri perbankan syariah cukup besar nilainya sebagai komposisi DPK (dana pihak ketiga) setelah deposito mudharabah. Sedangkan dominasi deposito mudharabah dalam komposisi DPK sesuai fungsinya memang sebagai sumber utama pembiayaan investasi.

Kemudian, apabila melihat pergerakan dana pihak ketiga secara triwulanan yang telah diuraikan sebelumnya berfluktuatif dan tertinggi sebesar 15,2 persen di triwulan IV tahun 2009 maka di periode yang sama pembiayaan investasi hanya tumbuh sebesar 6,23 persen dan bukanlah sebesar 8,97 persen lebih. Sehingga, memang benar adanya faktor lain yang mempengaruhi negatif pembiayaan investasi yaitu tingkat margin pembiayaan investasi.

Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh tingkat margin pembiayaan investasi atas nilai pembiayaan investasi yang disalurkan perbankan syariah juga memang sesuai yang diperkirakan dalam hipotesis. Hal ini dikarenakan posisi tingkat margin adalah ekspektasi keuntungan dari bank syariah yang berlaku fixed dan menjadi biaya bagi dunia usaha seperti suku bunga perbankan konvensional. Bahkan, dengan kondisi umum sesuai yang dikemukakan Bank Indonesia (2010) bahwa tingkat margin pembiayaan investasi perbankan syariah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga kredit investasi perbankan konvensional⁴⁶ maka dengan ditambah atas situasi umum dunia usaha yang rasional serta bebas menentukan sumber pembiayaan investasinya seperti yang dikemukakan oleh Mohammed (2006) dalam konsep profit and loss sharing, sehingga dengan kenaikan tingkat margin perbankan syariah tersebut maka akan berakibat turunnya pembiayaan investasi yang dapat diasalurkan.

Hasil estimasi yang menunjukkan bahwa variabel NPFi (pembiayaan investasi bermasalah) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan investasi meskipun memiliki arah negatif memang dapat berlaku demikian. Hal ini sesuai teori dan seperti yang dikemukakan Pratin dan Akhyar (2005) dalam studinya mengenai pembiayaan BMI (Bank Muamalat Indonesia) bahwa melalui penanganan pembiayaan bermasalah dengan reschedulling ataupun reconditioning yang telah di atur Bank Indonesia, maka pembiayaan bermasalah tidaklah akan menjadi kekhawatiran perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan investasinya.

Khusus untuk inflasi, maka dapat dilihat di dalam studi bahwa pengaruhnya juga tidak ada kepada pembiayaan investasi. Dengan demikian, dari triwulan ke empat tahun 2005 hingga triwulan ketiga 2010 inflasi tidaklah berpengaruh kepada pembiayaan investasi perbankan syariah. Jadi, inflasi seperti yang di kemukakan oleh Hamid

⁴⁶Bank Indonesia (2010).LPS 2007. Hal 38

(1995) berpengaruh kepada keuntungan dunia usaha dan perbankan syariah dalam model pembiayaan berbagi hasil dan resiko yang kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan investasi, bukanlah menjadi masalah dalam pembiayaan investasi. Sehingga, naik atau turunnya inflasi tidak akan mempengaruhi pembiayaan investasi. Kondisi tersebut juga sesuai dari hasil beberapa studi determinan investasi di Indonesia yang mengemukakan bahwa inflasi bukanlah faktor penentu dari investasi karena dunia usaha seperti produsen sudah terlalu jenuh dengan ekspektasi yang dilakukan atas dasar inflasi.

Kondisi inflasi tersebut lebih spesifik juga dapat dilihat bahwa sepanjang triwulan ke empat tahun 2005 hingga triwulan ketiga tahun 2010 tidak pernah mengalami inflasi yang serius di atas dua digit, namun hanya di bawah lima persen. Sehingga kondisi umum yang berlaku tidaklah terlalu mengkhawatirkan perbankan syariah.

5.2 Implikasi Penemuan Empiris

Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian hipotesis, diketahui bahwa kecenderungan yang akan terjadi di dalam pergerakan pembiayaan investasi perbankan syariah adalah sejalan dengan naik atau turunnya jumlah DPK (dana pihak ketiga), dan tingkat margin pembiayaan investasi (TM). Jika dana pihak ketiga naik maka pembiayaan investasi juga akan mengalami kenaikan dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan kenaikan tingkat margin pembiayaan investasi dan pembiayaan investasi bermasalah malah sebaliknya, yaitu mempengaruhi negatif pembiayaan investasi.

Dengan demikian, kebijakan yang perlu ditempuh agar pembiayaan investasi dari perbankan syariah dapat terus dinaikkan sharenya seperti pada saat tahun 2005 adalah memperhatikan kondisi dari dana pihak ketiga yang dibentuk oleh berbagai macam bentuk nasabah. Secara statistik dapat dilihat bahwa persentase perubahan dana

pihak ketiga antar triwulan terus berfluktuasi dan sumbangsih perubahannya jika hanya sepuluh persen maka baru dapat berpengaruh kepada pembiayaan investasi sebesar 8,94 persen (asumsi *ceteris paribus*). Sedangkan depositan (unit surplus) dapat berupa nasabah yang bersifat floating (mengambang), dan loyal syariah⁴⁷.

Sehingga, untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga tersebut diperlukan kebijakan dari bank umum dan unit usaha syariah agar memberikan bagi hasil yang kompetitif terutama untuk nasabah yang bersifat floating atau selalu bersandar kepada tingkat return yang paling tinggi. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan Bank Indonesia dalam outlook perbankan syariah tahun 2010 bahwa nasabah mengambang seperti korporasi sangat dikhawatirkan mengalihkan pendanaanya ke perbankan konvensional apabila return yang ditawarkan melalui tingkat bunga adalah lebih tinggi dari bagi hasil.

Kemudian, dengan kondisi bahwa adanya nasabah loyalis syariah dan didukung populasi masyarakat Indonesia adalah muslim maka diperlukan adanya promosi dan edukasi lebih baik atas pemahaman menabung dengan sistem syariah. Melalui beberapa hal inilah diharapkan dana pihak ketiga selalu tumbuh dan juga tidak melupakan bagi hasil yang kompetitif sehingga tidak akan terjadi perpindahan dana depositan ke perbankan konvensional akibat return yang ditawarkan ke perbankan konvensional lebih tinggi dan pada akhirnya mempersulit likuiditas terkait aktivitas pembiayaan investasi.

Selanjutnya, untuk tingkat margin rata – rata pembiayaan investasi dapat diketahui bahwa akan mempengaruhi negatif pembiayaan investasi. Sehingga, diharapkan perbankan syariah memperhatikan kenaikan tingkat margin yang dirasakan oleh dunia usaha masih menjadi biaya yang terendah dan juga berlaku kompetitif dengan menyesuaikan dengan suku bunga sesuai perilaku dunia usaha yang dapat

⁴⁷ Nuenung (2006). JIMBE., Vol.7 Hal 868

bersifat floating. Melalui hal inilah pembiayaan investasi perbankan syariah dapat dimungkinkan semakin besar dan begitu juga dengan sharenya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan investasi perbankan syariah di Indonesia hanya dilakukan melalui empat variabel independen, yaitu DPK, tingkat margin pembiayaan investasi, NPF investasi, dan Inflasi. Penulis berkeyakinan bahwa masih terdapat faktor – faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan investasi perbankan syariah. Sehingga, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan beberapa variabel independen lainnya.
2. Periode analisis penelitian sangat terbatas, hanya dari triwulan keempat tahun 2005 hingga triwulan ketiga tahun 2010, yang kemudian didalam estimasi terdapat data triwulan NPF investasi dan tingkat margin pembiayaan investasi yang hasilnya dari interpolasi.
3. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan analisa regresi linear berganda tanpa memperhatikan adanya kemungkinan pengaruh kondisi masa lalu dan kelambanan respon di setiap variabel independen DPK, NPF investasi, tingkat margin pembiayaan investasi dan inflasi atas pembiayaan investasi. Sehingga, menurut penulis diperlukan penelitian lanjutan mengenai pembiayaan investasi ini dengan menggunakan analisa ECM (*error correction model*) ataupun model *distributed lag* (model sebaran beda waktu).
4. Penelitian ini hanya meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan investasi di Indonesia, yang kemudian hasilnya hanya menjadi gambaran umum untuk perbankan syariah di seluruh Indonesia. Oleh karena

itu, dengan adanya kemungkinan perbedaan kondisi di setiap bank syariah maka untuk penelitian selanjutnya memang diakui haruslah merupakan penelitian studi kasus yang berfokus kepada beberapa bank umum dan unit usaha syariah ataupun perbankan syariah di daerah.

5. Analisa pembiayaan investasi perbankan syariah di dalam studi adalah untuk jangka pendek (*short run*) akibat keterbatasan data observasi yang memang seharusnya sesuai sifatnya adalah studi pembiayaan investasi dalam jangka panjang (*long run*).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan seperti yang telah diuraikan pada BAB V, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Selama periode triwulan pertama tahun 2006 hingga triwulan ketiga tahun 2010, pembiayaan investasi perbankan syariah memperlihatkan pertumbuhan yang cukup berfluktuatif yang kemudian juga diiringi dengan share pembiayaan investasi yang hanya bergerak dari 20 persen hingga 21 persen akibat pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat margin pembiayaan investasi.
- b. Adanya jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah sangat berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan investasinya dibandingkan dengan tingkat margin pembiayaan investasi
- c. Variabel pembiayaan investasi bermasalah dan inflasi tidaklah mempengaruhi pembiayaan investasi perbankan syariah. Sehingga, atas kondisi pembiayaan investasi bermasalah tersebut dan secara ekonomi makro yang dilihat dari angka inflasi triwulanan tidak akan menjadi permasalahan bagi perbankan syariah di Indonesia yang menyalurkan pembiayaan investasinya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut

- a. Berlakunya pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap realisasi pembiayaan investasi berarti perlu adanya peningkatan jumlah DPK yang

tidak berfluktuatif dari antar waktu, sehingga kebutuhan investasi dunia usaha dapat terpenuhi. Dengan demikian, perlu adanya terobosan yang lebih baik dari sosialisasi perbankan syariah selama ini ke masyarakat atas berbagai kelebihan produk penghimpunan dananya.

- b. Tingkat Margin pembiayaan investasi yang terkadang mengalami kenaikan tidaklah diharapkan terjadi dengan kondisi dunia usaha yang rasional memperhitungkan biaya investasi yang terendah.
- c. Tingkat margin pembiayaan investasi yang dapat berada di atas suku bunga kredit investasi pada akhirnya memang dapat menjadi permasalahan dunia usaha dalam menggunakan produk pembiayaan investasi berakad murabahah. Hal ini memang tidak diharapkan terjadi dan secara kelembagaan perbankan syariah hanyalah sebagian kecil dari industri perbankan nasional yang dengan demikian sudah seharusnya pada saat ini perbankan syariah lebih memperhatikan permintaan pembiayaan dalam jangka panjang seperti menerapkan tingkat margin yang kompetitif dengan perbankan konvensional akibat adanya dunia usaha yang dapat bersifat floating.
- d. Khusus untuk pengembangan studi selanjutnya, memang diharapkan studi pembiayaan investasi perbankan syariah juga difokuskan kepada tingkat bagi hasil (share keuntungan) melalui pembiayaan berakad mudharabah dan musharakah yang telah terealisasi selama ini. Kemudian, juga diperlukan analisa lanjutan mengenai tingkat margin pembiayaan investasi yang berakad murabahah dengan pemisahan dari pembiayaan investasi secara agregat ke pembiayaan investasi murabahah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas Valadkhani (2004). What Determines Private Investment In Iran. International Journal Of Social Economics, Vol. 31. Emerald Group Publishing Limited.
- Adiwarman Karim. (2004). *Bank Islam*. ed.2. Kharisma Putra Utama Offshet : Jakarta.
- _____ (2007). *Ekonomi Makro Islami*. ed.2. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Agus Choiron (2005), *Interpolasi-bab IV. Program Semi Que*, Unibraw.
- Aryaningsih, Ni Nyoman (2008). Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, dan Jumlah Penghasilan Terhadap Permintaan Kredit di PT BPD Cabang Pembantu Kediri. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora – April. Lembaga Penelitian Undikhsa
- Badan Pusat Statistik (2010). Data Strategis BPS
- _____ (2010). Laporan Bulanan Inflasi Nasional Tahun 2005 – September 2010.
- Bambang Juanda (2009). *Ekonometrika : Permodelan dan Pendugaan*. IPB Press : Bandung.
- Bank Indonesia (2001). “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2000
- _____ (2003). *Pedoman Standar Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum* – Lampiran dari SE No.5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPPB).
- _____ (2004). “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2003”.
- _____ (2005). “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2004”
- _____ (2005). “Statistik Perbankan Syariah Tahun 2004”.
- _____ (2006). “Statistik Perbankan Indonesia Bulan Desember 2005”.
- _____ (2007). “Kodifikasi Produk Perbankan Syariah”.
- _____ (2008). “Arah dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Seminar di Universitas Andalas. Outline Presentasi. Padang.
- _____ (2008). Surat Edaran No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September, Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.
- _____ (2008). “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2007”.
- _____ (2009). “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008”.
- _____ (2009). “Statistik Perbankan Indonesia Bulan Desember 2008”.
- _____ (2009). “Statistik Perbankan Syariah, April 2009”.

- _____ (2010). Surat Edaran No.12/32/Dpbs tanggal 18 November 2010, Ketentuan Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Bank Indonesia (2010). “Statistik Perbankan Indonesia Bulan Desember 2009”.
- _____ (2010). “Statistik Perbankan Indonesia Bulan Juni 2010”.
- _____ (2010). “Statistik Perbankan Indonesia Bulan September 2010”.
- _____ (2010). “Statistik Perbankan Syariah Bulan Juni 2010”.
- _____ (2010). “Statistik Perbankan Syariah Bulan September 2010”.
- Budiono (1996). *Ekonomi Moneter*. BPFE : Yogyakarta.
- Dornbusch Rudiger and Stanley (1995). *Makro Ekonomi*. Erlangga : Jakarta.
- Hamid Zangeneh (1995). A Macroeconomic Model Of an Interest – free System. The Pakistan Development Review. 34 :1 – pp 55-68 , Spring.
- Iqbal Hasan (2004). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Isa Salim (2006). Analisis Faktor – Faktor Ekonomi Makro Yang Mempengaruhi Investasi Pada Sektor Pertanian di Indonesia Periode Tahun 1984 – 2004. Skripsi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
- Juli Imayanto, et.al (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Universitas Trisakti : Jakarta.
- Mannan, Muhammad Abdul (1993). *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek (dasar – dasar ekonomi islam)*. PT. Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta.
- Meydianawathi, Luh Gede (2007). Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia Tahun 2002 – 2006, Vol. 12. No 2. Buletin Studi Ekonomi Universitas Udayana.
- Mochamad Faza Rifai (2007). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah. Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Mohammed Boudjellal (2006). “Three Decades Of Experimentation : Rethinking the Theory Of Islamic Banking”. Review of Islamic Economics, Vol 10. No. 1, International Associations For Islamic Economics.
- Muhamad Iskandar (2006). Analisis Pengaruh Tingkat Laju Inflasi dan Suku Bunga Pinjaman Terhadap Penyaluran Kredit di Propinsi Sumatera Utara. Skripsi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.
- Nachrowi Djalal dan Hardius Usman (2005). *Penggunaan Teknik Ekonometri – Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan*

- Data dengan Menggunakan Paket Program SPSS*. Ed : 1. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Nuenung Ratna Hayati (2006). Perbankan Syariah Nasional. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan ekonomi (JIMBE). Vol. 7, No. 3, Bulan Februari.
- Nopirin (2000). *Ekonomi Moneter Buku II*. BPFE : Yogyakarta.
- Nurul Huda. et. al (2008). *Ekonomi Makro Islam - Pendekatan Teoretis*. ed : 1. Kencana Prenada Media Grup : Jakarta.
- Pratin and Akhyar Adnan (2005). Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil, dan Mark Up Keuntungan terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah – Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Kajian Bisnis dan Manajemen - Edisi Khusus On Finance, Sinergi*.
- Priyo Rokhadi Widodo dan Tarsidin (2007). Pengaruh Ekonomi Makro Terhadap Resiko Sektoral di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan – Oktober. Bank Indonesia.
- Republika Newsroom (2009). “Arie Mooduto - Nasabah Bank Syariah Tak Steril dari Krisis”. Selasa, 5 Mei.
- Sadono Sukirno (1995). *Pengantar Teori Ekonomi Makro – Ed.2*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- _____ (2000). *Makro Ekonomi Moderen – Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Ed.1. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Samuelson, Paul A and Nordhaus, William D (2004). *Ilmu Makro Ekonomi* . ed:17. PT. Media Global Edukasi : Jakarta.
- Sayed and Nezamaddin Makiyan (1995). “The Role Of Rate Of Return on Loans In the Islamic Banking System Of Iran”. *International Journal Of Islamic Financial Services*, Volume 3, Number 3.
- Stanislaus (2006). *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sunarto Zulkifli (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Wiwin Setyari. et.al (2008). Analisis Determinan Investasi Indonesia Tahun 1985 – 2005 - Teknik Konitegrasi dan ECM (Error Correction Model). Universitas Udayana Denpasar.
- Zakaria (2010). *Metode Numerik*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar (PPBA). UMB.

Lampiran 1

Tabel Data Regresi

Periode	Pembiayaan Investasi / PI Milliar (Rupiah)	Dana Pihak Ketiga / DPK (Milliar Rupiah)	Tingkat Margin (%)	Pembiayaan Investasi Bermasalah (%)	Inflasi (%)
Q4 2005	4.287,19	15.582,32	12,51	3,45	10,08
Q1 2006	4.561,47	14.955,70	12,72	3,85	1,98
Q2	4.875,94	16.432,73	12,92	4,16	0,87
Q3	4.530,57	17.975,51	13,13	5,09	1,16
Q4	4.373,73	20.672,18	13,34	5,90	2,44
Q1 2007	4.230,00	21.882,93	13,47	6,50	1,91
Q2	4.900,00	22.714,26	13,61	5,96	0,17
Q3	5.410,00	24.680,42	13,73	5,71	2,28
Q4	5.640,00	28.011,67	13,87	5,78	2,09
Q1 2008	5.870,00	29.552,00	13,33	6,08	3,42
Q2	6.930,00	33.048,00	13,38	6,40	2,46
Q3	7.695,00	33.568,00	13,43	6,64	2,88
Q4	7.907,00	36.852,00	13,67	6,18	0,54
Q1 2009	8.229,00	38.040,00	12,39	7,08	0,36
Q2	8.696,00	42.103,00	13,35	5,92	-0,15
Q3	9.371,00	45.381,00	13,37	7,79	2,07
Q4	9.955,00	52.271,00	13,75	5,36	0,49
Q1 2010	10.814,00	52.811,00	13,82	5,84	0,99
Q2	11.233,00	58.079,00	13,82	5,45	1,41
Q3	12.120,00	63.912,00	13,45	6,44	2,79

Lampiran 2

Tabel Hasil Regresi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.248E8	4	3.120E7	199.592	.000 ^a
	Residual	2344846.480	15	156323.099		
	Total	1.271E8	19			

a. Predictors: (Constant), Inflasi atas dasar IHK, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Margin Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Investasi Bermasalah

b. Dependent Variable: Pembiayaan Investasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.991 ^a	.982	.977	395.37716	.982	199.592	4	15	.000	1.785

a. Predictors: (Constant), Inflasi atas dasar IHK, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Margin Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Investasi Bermasalah

b. Dependent Variable: Pembiayaan Investasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10278.472	3281.519		3.132	.007					
	Dana Pihak Ketiga (DPK)	.181	.007	1.047	24.539	.000	.985	.988	.860	.676	1.480
	Tingkat Margin Pembiayaan Investasi (TM)	-625.919	249.573	-.103	-2.508	.024	.371	-.544	-.088	.722	1.385
	Pembiayaan Investasi Bermasalah (NPMI)	-137.591	104.260	-.055	-1.320	.207	.424	-.323	-.046	.696	1.438
	Inflasi atas dasar IHK (P)	-51.803	47.902	-.043	-1.081	.297	-.281	-.269	-.038	.777	1.286

a. Dependent Variable: Pembiayaan Investasi (PI)

Coefficient Correlations^a

Model		Inflasi atas dasar IHK	Dana Pihak Ketiga	Tingkat Margin Pembiayaan Investasi	Pembiayaan Investasi Bermasalah	
1	Correlations	Inflasi atas dasar IHK	1.000	.024	.254	.278
		Dana Pihak Ketiga	.024	1.000	-.337	-.361
		Tingkat Margin Pembiayaan Investasi	.254	-.337	1.000	-.078
		Pembiayaan Investasi Bermasalah	.278	-.361	-.078	1.000
		Covariances				
	Inflasi atas dasar IHK	2294.617	.008	3033.718	1388.134	
	Dana Pihak Ketiga	.008	5.459E-5	-.622	-.278	
	Tingkat Margin Pembiayaan Investasi	3033.718	-.622	62286.931	-2026.393	
	Pembiayaan Investasi Bermasalah	1388.134	-.278	-2026.393	10870.201	

a. Dependent Variable: Pembiayaan Investasi (PI)